



DRAFT LAPORAN AKHIR

KAJIAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PENATAAN KAWASAN SELINGKAR GUNUNG WILIS DI PROVINSI JAWA TIMUR

KERJASAMA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

TAHUN 2016

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : “Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur”

Ketua Peneliti
A. Nama : M. Rondhi, S.P., M.P., Ph.D
B. Pangkat/ Golongan/NIP : IIIc / Penata /19770706200801 1 012
C. Jabatan : Lektor
D. Instansi : Universitas Jember

Anggota Tim : 1. Aryo Fajar Sunartomo, SP, M.Si
2. Ebban Bagus Kuntadi, SP, M.Sc
3. Subhan Arief Budiman, SP., M.P.
4. Khoiron, S.KM., M.Sc

Lokasi Penelitian : Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung

Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan

Jumlah/Sumber Dana :
A. Jumlah Dana : Rp. 200.220.000,- (Dua Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
B. Sumber Dana : APBD Balitbang Provinsi Jawa Timur TA 2016

Jember, September 2016

Mengetahui,
Kepala Bidang Pemerintahan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur

Lembaga Penelitian (LEMLIT)
Universitas Jember
Ketua,

Dr. Turmudzi, SH, MM, MBA
NIP. 19611021 199803 1 001

Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., Ph.D
NIP. 196905171992011001

Menyetujui,

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19570215 198608 1 001

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Pendahuluan kegiatan “Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur” merupakan tahap lanjutan setelah penyusunan proposal. Dimana dalam Laporan Pendahuluan ini menunjukkan perkembangan kegiatan dengan menggambarkan desain operasional kajian dan gambaran umum wilayah penelitian.

Uraian Laporan Pendahuluan ini tersusun atas beberapa bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, gambaran umum lokasi penelitian dan daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Balitbang Propinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada Lembaga Penelitian Universitas Jember untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan semoga Laporan Pendahuluan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, April 2016

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul depan	i
Sampul dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Hasil Yang Diharapkan	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pendekatan Teoritis dan Empiris	6
2.2 Kerangka Konsep.....	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Lokasi Dan Jangka Waktu	30
3.3 Teknik Pengambilan Dan Pengumpulan Data	31
3.4 Analisis Data.....	32

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun.....	35
3.2 Gambaran Umum Kabupaten Kediri	41
3.3 Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung.....	47
3.4 Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Jadwal/Rencana Survey
2. Disain Riset
3. Instrument Survey

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daerah Terhubung di Selingkar Gunung Wilis.....	1
Tabel 2.1	Skala prioritas dalam AHP.....	20
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013	42
Tabel 4.2	Perkembangan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013	44

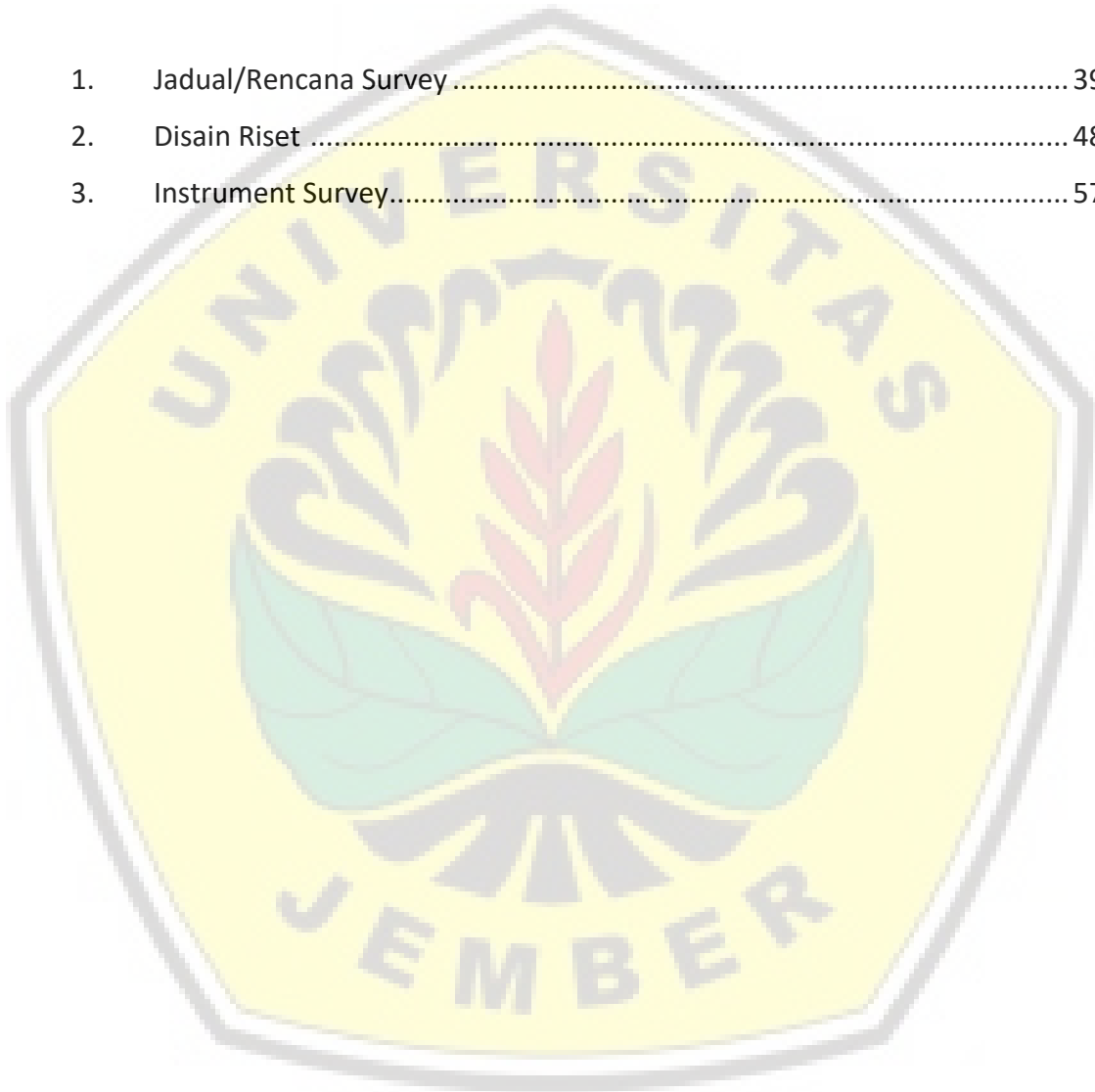


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Barang Sumberdaya.....	12
Gambar 2.2	Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Persediaan Sumberdaya Alam.....	12
Gambar 2.3	Kerangka Konsep Penelitian.....	29
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Madiun.....	35
Gambar 4.2	Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Madiun.....	40
Gambar 4.3	Peta Wilayah Kabupaten Kediri.....	41
Gambar 4.4	Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Kediri....	46
Gambar 4.5	Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung.....	47
Gambar 4.6	Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Tulungagung.....	57
Gambar 4.7	Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek.....	58
Gambar 4.8	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Trenggalek.....	59
Gambar 4.9	Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Trenggalek.....	60
Gambar 4.10	Jumlah Penduduk dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.....	63
Gambar 4.11	Produksi Padi, Jagung dan Ubi Kayu di Kabupaten Trenggalek antara Tahun 2012 – 2014 dalam Satuan (Ton)	64
Gambar 4.12	Produksi Produksi Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kedelai di Kabupaten Trenggalek antara Tahun 2012 – 2014 dalam Satuan (Ton).....	64
Gambar 4.13	Luas Hutan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 dalam Satuan (Ha).....	65
Gambar 4.14	Populasi Ternak Besar Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Dalam Satuan (Ekor).....	66
Gambar 4.15	Perusahaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015.....	67
Gambar 4.16	Panjang Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2010 - 2014 (000 Km) di Kabupaten Trenggalek.....	68
Gambar 4.17	Perkembangan PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2014 (Milyar Rupiah).....	69
Gambar 4.18	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014.....	69
Gambar 4.19	Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Trenggalek	70

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Jadual/Rencana Survey	39
2.	Disain Riset	48
3.	Instrument Survey.....	57



BAB I PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Gunung Wilis adalah salah satu gunung di Jawa Timur yang berada di kawasan atau wilayah yang merupakan bagian dari 6 (enam) kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Enam daerah tersebut yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Madiun. Selanjutnya, kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Gunung Wilis tersebut disebut Kawasan Selingkar Wilis.

Secara Administratif kawasan selingkar Gunung Wilis meliputi 6 Kabupaten yang terdiri dari 112 Kecamatan, 1.569 Desa/Kelurahan. Luas wilayah : $\pm 7.942,88$ km² dengan jumlah penduduk $\pm 6.187.353$ jiwa, sedangkan total penduduk miskin sebesar ± 761.869 jiwa. Infrastruktur jalan penghubung antar daerah di Selingkar Gunung Wilis merupakan syarat utama dalam pengembangan kawasan wilayah Selingkar Gunung Wilis. Adapun wilayah yang di masing-masing kabupaten di Selingkar Gunung Wilis yang dapat saling menghubungkan adalah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daerah Terhubung di Selingkar Gunung Wilis

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Tulungagung	Kec. Sendang	Ds. Nyawangan
Kediri	Kec. Mojo	Ds. Petungroto
Kediri	Kec. Grogol	Ds. Kalipang
Nganjuk	Kec. Loceret	Ds. Bajulan
Nganjuk	Kec. Sawahan	Ds. Bendolo
Madiun	Kec. Gemarang	Ds. Durenan
Madiun	Kec. Kare	Ds. Kepel
Ponorogo	Kec. Ngebel	Ds. Pupus
Ponorogo	Kec. Sooko	Ds. Ngadirojo
Trenggalek	Kec. Bendungan	Ds. Masaran
Trenggalek	Kec. Bendungan	Ds. Botoputih
Tulungagung	Kec. Pagerwojo	Ds. Sidomulyo

Menyadari akan besarnya potensi yang dimiliki pada Daerah Selingkar Wilis maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Gubernur, pada tanggal 11 Juni 2014 memprakarsai dibentuknya perjanjian kerjasama antar daerah di Selingkar Gunung Wilis dalam upaya mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki. Dalam penandatanganan kerjasama oleh enam daerah yang terletak disekitarnya. Kerjasama antar daerah diperlukan dalam upaya memaksimalkan potensi kawasan yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan.

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu paradigma baru pembangunan daerah yang mendapat perhatian pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara baik ketahanan pangan maupun kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Pemerintah menyadari perlunya kerjasama dalam mempercepat pembangunan, hal ini nampak dari beberapa produk hukum Petunjuk dan Pedoman kerjasama sebagai berikut :

1. Permendagri No 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama antar Daerah.
2. Kepmendagri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan antar Daerah
3. SE-MENDAGRI No 114/4538/PUOD tanggal 4 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksana Mengenai Kerjasama antar Daerah dan
4. SE-MENDAGRI No 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama antar Propinsi (Sister Province) dan antar kota (Sister City) dalam dan Luar Negeri. Serta Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama antar Daerah.

Memperhatikan dengan banyaknya potensi di Kawasan Selingkar Gunung Wilis yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sekitarnya. Beberapa potensi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dibuat suatu model kerjasama

penanganan kawasan secara terpadu. Optimalisasi potensi di sebuah kawasan diperlukan strategi induk yang terpadu antar wilayah disekitar kawasan. Diperlukan komitmen pengelolaan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di sekitar kawasan Selingkar Gunung Wilis.

Didalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama daerah, perlu diperkuat wawasan dan komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya kerjasama kewilayahan untuk mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Persamaan visi pemerintah daerah adalah modal dasar dalam mewujudkan rencana dimaksud sehingga diperlukan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah tidak terlepas dari konektivitas dan sinkronisasi rencana pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Maka dari itu kegiatan Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur diperlukan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kajian ini dijelaskan pada sub bab rumusan masalah berikut ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur dapat diidentifikasi dan diterjemahkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Eksisting Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
3. Bagaimana Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?

4. Apa saja hambatan dalam Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
5. Bagaimana Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur ini adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
2. Mengidentifikasi *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
3. Mengidentifikasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
4. Mengidentifikasi hambatan dalam Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
5. Merancang Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka dapat diperoleh manfaat (outcome) dari kegiatan ini adalah adanya suatu rancangan induk kebijakan dalam Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur ini adalah :

1. Rancangan Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?
2. *Actionplan Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini?

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup penelitian. Adapun secara rinci ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Kawasan Selingkar Gunung Wilis
2. *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis
3. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Teoritis dan Empiris

2.1.1 Pendekatan Teoritis

2.1.1.1 Konsep Kewilayahan

Ilmu pembangunan wilayah merupakan ilmu yang relatif masih baru. Budiharsono (2001) menyebutkan bahwa ilmu pembangunan wilayah merupakan wahana lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu: geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu ilmu pengetahuan wilayah setidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar analisis, yaitu: (1) analisis biogeofisik; (2) analisis ekonomi; (3) analisis sosiobudaya; (4) analisis kelembagaan; (5) analisis lokasi; (6) analisis lingkungan.

Rustiadi (2002) menyebutkan bahwa lingkup kajian perencanaan pengembangan wilayah sangat luas, sebagai bidang kajian yang membentang dari lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencakup bidang-bidang ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi hingga manajemen. Dari sisi proses kajian pembangunan mencakup hal-hal mengenai: (1) aspek pemahaman, yakni aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial ekonomi di dalam dan antar wilayah, dalam konteks ini pengetahuan mengenai teknik-teknik analisis dan model-model sistem merupakan alat (*tools*) penting yang perlu dipahami, untuk mengenal dan mendalami permasalahan-permasalahan maupun potensi-potensi pembangunan wilayah, (2) aspek perencanaan, mencakup proses formulasi masalah, teknik-teknik desain dan pemetaan hingga perencanaan, dan (3) aspek kebijakan, mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan tujuan-tujuan pembangunan serta proses melaksanakannya, mencakup proses-proses politik, administrasi, dan manajerial pembangunan.

Secara harfiah, Rustiadi (2002) menyebutkan bahwa *regional science* dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan kaidah-kaidah tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Dalam hal ini *regional science* tidak didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan pembangunan di suatu wilayah, karena pengertian demikian tidak memberikan spesifikasi yang jelas terhadap bidang keilmuan *regional science*. Secara ilustrasi, walaupun kata 'di suatu wilayah' itu dihilangkan, kita tetap bisa menangkap suatu pemahaman bahwa setiap pembangunan pasti dilakukan pada suatu wilayah atau areal tertentu. Padahal penambahan kata wilayah ini dimaksudkan untuk memberikan kekhasan bahwa *regional science* adalah bidang ilmu yang berbeda dengan bidang-bidang ilmu perencanaan pembangunan lainnya, yakni penekanan pada dimensi kewilayahan.

Selanjutnya Budiharsono (2001) menyebutkan pentingnya ilmu pembangunan wilayah dalam konteks pembangunan di Indonesia dan wilayah pesisir pada khususnya, dikarenakan :

1. Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana kegiatan-kegiatan pembangunan saat ini dipusatkan di bagian barat. Konsentrasi demikian menimbulkan isu pengembangan wilayah '*outer island*' yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berdimensi wilayah.
2. Pembangunan masa lalu lebih menitikberatkan pada pembangunan daratan dari lautan, sehingga pembangunan pesisir relatif tertinggal. Masyarakat pesisir relatif lebih miskin dari wilayah daratan lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan posisi politik nelayan yang relatif lemah.
3. Letak geografis Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh faktor geologis dan ekologis yang menyebabkan keragaman lingkungan.
4. Keragaman kultural menyebabkan adanya perbedaanpersepsi terhadap pembangunan.
5. Sifat pembangunan politik di Indonesia yang diwarnai oleh kekuatan

politik wilayah.

6. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang merupakan antisipasi terhadap maraknya tuntutan lepasnya beberapa daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan pemerintah dapat membangun sesuai kebutuhan dan kemampuannya sendiri.
7. Pembangunan Indonesia masih bersifat sektoral, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.

2.1.1.2 Teori Pengelolaan Kawasan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007, pengelolaan berarti suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya, kawasan lindung berarti wilayah yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup sedangkan kawasan budidaya berarti wilayah yang ditetapkan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini, tanpa mengorbankan potensi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di masa mendatang.

Pengelolaan kawasan dapat diartikan sebagai proses peran serta sumber daya manusia secara berkesinambungan dan sistematis dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk membawa kawasan pada kondisi yang lebih baik pada masa yang akan datang dan memecahkan masalah kawasan pada saat ini. Dimensi pengelolaan kawasan yaitu partisipasi masyarakat, kelembagaan, infrastruktur, keterlibatan swasta, transportasi, sumber daya manusia, peraturan dan kebijakan, pengelolaan lahan, peluang pekerjaan, kemitraan masyarakat, pemerintah dan swasta, finansial/keuangan dan manajemen promosi. Dari keseluruhan dimensi tersebut, akan dibahas dua dimensi saja, yaitu kelembagaan dan partisipasi masyarakat, karena di awal penelitian terdapat indikasi lemahnya penegakan aturan, dan pengelolaan

kawasan menyangkut stakeholder yang terlibat.

Pengelolaan terdiri atas dua elemen terkait, yaitu organisasi tugas-tugas untuk mencapai tujuan dan mengerahkan orang untuk melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan pada dua elemen tersebut, ada berbagai tugas pengelolaan sebagai berikut:

- a) mengidentifikasi proses pelatihan dan rekrutmen, dukungan lingkungan terhadap proyek, dan kesenjangan informasi;
- b) merundingkan tugas-tugas dan hubungan-hubungan para staf, hubungan antara pendukung di luar organisasi dengan staf, dan prosedur penyelesaian konflik;
- c) mengorganisasi pelaksanaan proyek, dan proses-proses komunikasi;
- d) melakukan penyeliaan prosedur pemantauan, jadwal dan anggaran;
- e) belajar dari evaluasi dan umpan balik.

Berdasarkan beberapa teori pengelolaan tersebut, tahapan pengelolaan dimulai dari survey awal atau mengidentifikasi lokasi, hingga tahapan monitoring dan evaluasi. Teori pengelolaan ini akan digunakan dalam mengkaji tahapan-tahapan pengelolaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Selingkar Gunung Wilis khususnya Pemerintah Kabupaten Madiun, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek.

2.1.1.3 Konsep Teori Ekonomi Sumberdaya Alam

Pengertian antara sumberdaya alam (*natural resource*) dan barang sumberdaya (*resource commodity*) perlu dibedakan karena agar tidak menjadi kacau dan membingungkan. Pengertian sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi termasuk tanah itu sendiri. Jadi pengertian sumberdaya alam adalah sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan pengertian barang sumberdaya adalah sumberdaya

alam yang sudah diambil dari dalam atau dari atas bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain sehingga dapat dihasilkan produk baru yang berupa barang dan jasa bagi konsumen maupun produsen.

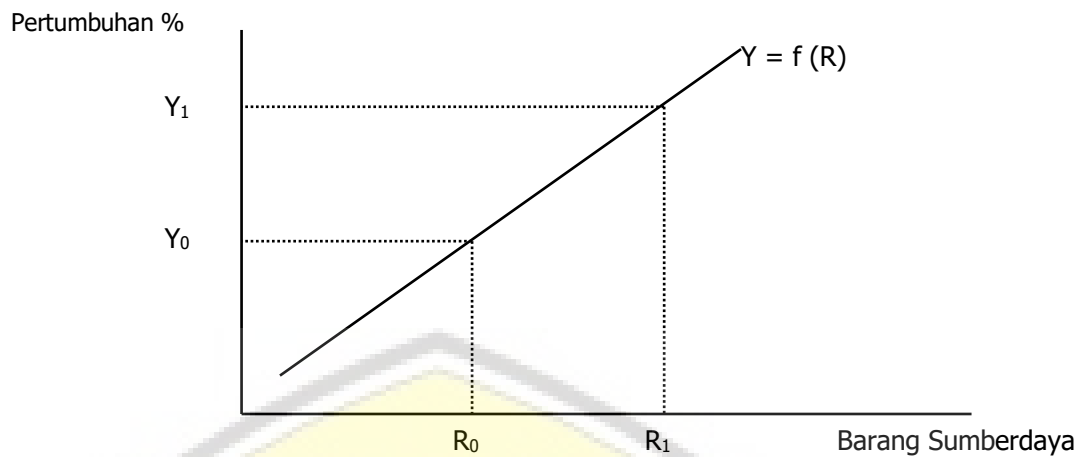
Sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati merupakan unsur lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Pentingnya sumberdaya alam secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.*

Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan peradaban manusia. Untuk itu, pandangan jangka pendek yang berorientasi ekonomi harus diubah menjadi pandangan atau paradigma keberlanjutan yang bertumpu pada pemikiran perlunya keadilan antar generasi. Dalam tataran perilaku, sikap *anthropocentris* yang memandang manusia itu berkuasa atas alam harus diubah menjadi sikap yang *holism*, suatu sikap yang menempatkan manusia bersama alam. Sikap kebersamaan ini sebagai ekspresi bahwa manusia harus menghargai alam dan alam memiliki keterbatasan. Pandangan *keberlanjutan* dan *holism* ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa konservasi sumberdaya alam tak terbaharui (*unrenewable resources*) harus menjamin pemanfaatannya secara bijak. Artinya harus memperhatikan daya dukungnya (*carrying capacity*). Sedangkan sumberdaya alam yang terbaharui (*renewable resources*) dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keberkesinambungan.

Pengelolaan sumberdaya alam yang berlangsung dan dijalankan selama ini lebih didasarkan kepada kepentingan kebutuhan investasi dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi. Sumberdaya alam (hutan, tambang, sumberdaya air dan mineral) dipandang serta dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum dipahami sebagai *ecological* dan *sustainable sense*.

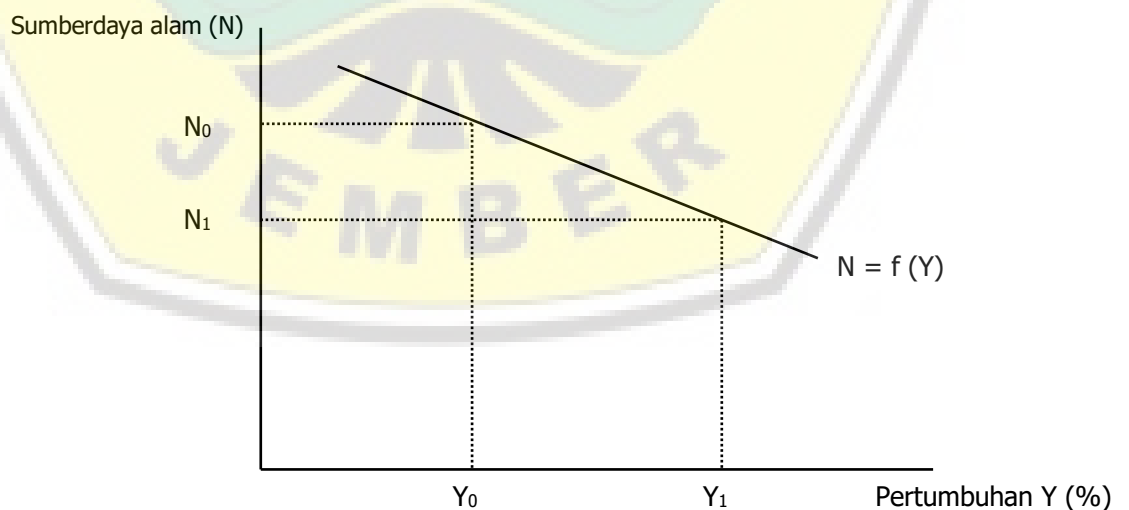
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumberdaya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumberdaya yang dipakai dalam proses produksi. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak barang sumberdaya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi tersedianya sumberdaya alam yang ada di bumi karena barang sumberdaya itu harus diambil dari tempat persediaan (stock) sumberdaya alam. Jadi dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi karena merasa tertinggal dan ingin menghilangkan adanya kemiskinan, maka akan berarti semakin banyak barang sumberdaya alam yang diambil dari dalam bumi dan akan semakin sedikit jumlah persediaan sumberdaya alam tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang positif antara jumlah dan kuantitas barang sumberdaya alam dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya ada hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumberdaya alam yang ada di dalam bumi. Disamping itu, dengan pembangunan ekonomi yang cepat dibarengi dengan pembangunan pabrik akan tercipta pula pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin membahayakan kehidupan manusia.

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang digambarkan pada sumbu vertikal merupakan fungsi dari tersedianya barang sumberdaya yang digambarkan pada sumbu horisontal. Kurva $Y = f(R)$ menunjukkan adanya hubungan positif yang artinya bila jumlah barang sumberdaya yang dipakai dalam proses produksi bertambah maka perekonomian juga berkembang lebih maju. Misal dalam Gambar 2.1 dapat dilihat bila jumlah barang sumberdaya yang dipakai dalam perekonomian setinggi R_0 , maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan setinggi Y_0 , dan bila jumlah barang sumberdaya alam yang dipakai bertambah menjadi R_1 , maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi yaitu Y_1 . Secara ringkas Gambar 2.1 disajikan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Barang Sumberdaya

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa jumlah persediaan sumberdaya alam (N) merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi (Y) dan terdapat hubungan yang negatif artinya semakin cepat pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian akan semakin menipis tersedianya sumberdaya alam di wilayah. Dalam Gambar 2.2 ditunjukkan pada saat pertumbuhan ekonomi setinggi Y_0 %, maka jumlah persediaan sumberdaya alam adalah N_0 dan bila laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi Y_1 %, maka jumlah persediaan sumberdaya alam menurun menjadi N_1 . Secara ringkas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumberdaya alam disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Persediaan Sumberdaya Alam

Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa dengan adanya pembangunan yang sangat cepat, apabila tidak berhati-hati, pasti pembangunan tersebut akan dapat segera menguras sumberdaya alam yang di wilayah, dan pada gilirannya barang sumberdaya yang diperlukan bagi pembangunan juga akan terbatas adanya, sehingga hal ini akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan wilayah.

2.1.1.4 Teori Pembangunan Daerah

Pembangunan menurut Siagian (1994), adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Sedangkan Kartasmita (1994), memberikan pengertian pembangunan, adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Bratakusumah (2005), dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Daerah mengemukakan bahwa, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah, karena secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula dan ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan, menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan suatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Istilah pembangunan (*development*) secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional, yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (*gross national product*) nya pada tingkat 5 persen hingga 7 persen, atau

bahkan lebih tinggi lagi, jika hal itu memang memungkinkan. Ukuran lain yang mirip dengan GNP, yakni yang dikenal dengan istilah produk domestik bruto atau GDP (*gross domestic product*) sama seringnya digunakan. Indeks ekonomi lainnya yang juga sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pendapatan perkapita (*income per capita*) atau GNP per kapita. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya (Todaro, 2000), dan ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah:

- a. Kecukupan (*sustenance*) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Jati diri (*selfesteem*) yaitu menjadi manusia seutuhnya, serta
- c. Kebebasan (*freedom*) yaitu kemampuan untuk memilih.

Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang jaman.

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain adalah, menaikkan standar hidup, memperbaiki tingkat pendidikan, kesehatan dan persamaan hak untuk memiliki kesempatan dalam memperoleh semua komponen-komponen penting dari hasil pembangunan ekonomi.

Meier (1989) mendefinisikan pembangunan ekonomi, adalah suatu proses di mana pendapatan perkapita penduduk suatu negara secara riil cenderung naik secara terus menerus dalam jangka panjang; dengan syarat utama bahwa jumlah penduduk yang berada dalam "garis kemiskinan absolut" tidak bertambah dan distribusi pendapatan tidak menjadi lebih timpang.

Kecenderungan menaik itu haruslah paling tidak dua atau tiga dasawarsa- waktu sepanjang itu cukup sebagai indikasi untuk melihat apakah suatu negara dalam keadaan berkembang atau tidak. Sejalan dengan Meier, Chenery dan Syrquin (1989), mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan pendapatan per kapita yang disertai antara lain, dengan proses transformasi dari suatu perekonomian yang dominan sektor primer atau pertanian dan pertambangan menjadi makin dominan sektor industri, terutama industri manufaktur dan sektor jasa.

2.1.1.5 Konsep Kerjasama Antar Daerah

Urgensi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah didasarkan atas beberapa pertimbangan yang rasional untuk kemajuan bersama dan karena masing-masing daerah saling memerlukan. Yeremias T. Kaban memaparkan setidaknya ada tujuh alasan mengapa pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain, yaitu:

1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Keterbatasan daerah bisa tertutup oleh potensi yang dimiliki daerah lain, sehingga potensi atau kekuatan masing-masing daerah dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang sulit apabila ditangani sendiri oleh satu daerah;
2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Terbuka peluang untuk transfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi masing-masing daerah, sehingga bisa memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama;
3. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Kerjasama menghasilkan posisi tawar yang lebih tinggi dalam rangka memperjuangkan kepentingannya, kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi;
4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Kerjasama berpotensi meningkatkan pengertian dan saling membantu masing-masing pihak, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah

terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut;

5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Kerjasama membuka transparansi antardaerah karena masing-masing memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan;
6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang- bidang yang dikerjasamakan. Hal ini terutama jika pelaksanaan kerjasama telah memberikan manfaat bagi masing-masing daerah, sehingga sangat terbuka peluang untuk dilakukan secara berkelanjutan;
7. Kerjasama dapat menghilangkan ego daerah. Masing-masing daerah bisa mengurangi ego kedaerahan, untuk mewujudkan visi memajukan daerah secara bersama-sama.

Beberapa isu strategis yang selama ini berpotensi untuk dikerjasamakan antar pemerintah daerah diungkapkan oleh Antonius Tarigan di antaranya adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Publik;
2. Pengelolaan Kawasan Perbatasan;
3. Penanganan Tata Ruang;
4. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik;
5. Penanganan Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah;
6. Peningkatan peran Provinsi sebagai fasilitator dan katalisator kerjasama antardaerah.

Oleh karena itu, kerjasama antardaerah bisa diterapkan untuk berbagai isu strategis dan urgen yang ada di daerah. Gary D. Taylor¹⁰ merinci beberapa kemungkinan bentuk yang bisa diwujudkan dalam kerjasama antardaerah, yaitu:

1. ***Handshake Agreement***, kerjasama antar daerah tanpa dokumen perjanjian formal. Bentuk kerjasama didasarkan pada komitmen dan kepercayaan yang tinggi secara politis antardaerah yang terkait.

2. ***Fee for service contracts (service agreements)***. Wujud kerjasama ini dimana satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik atau melayani masyarakat dari daerah lain. Misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan system kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama.
3. ***Joint Agreements*** (pengusahaan bersama). Diperlukan keterlibatan masing-masing daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan secara bersama-sama.
4. ***Jointly formed authorities*** (pembentukan otoritas bersama) Masing-masing daerah bersepakat membentuk lembaga yang diserahkan kepada pihak yang profesional untuk mengelolanya.

Landasan atau regulasi atau kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama antardaerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik telah dikeluarkan oleh pemerintah. Mulai dari terdahulu hingga terbaru adalah:

1. Permendagri No 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
2. Kepmendagri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
3. SE-Mendagri No 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Propinsi (Sister Province) dan Antar Kota (Sister City) Dalam dan Luar Negeri;
4. SE-Mendagri No 114/4538/PUOD tanggal 4 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksana Mengenai Kerjasama Antar Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Antar Daerah.
7. Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan sesama pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga (publik dan juga swasta) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas kerjasama antardaerah yang bertetangga.

2.1.1.6 Manajemen Pemerintahan

Studi organisasi adalah telaah tentang pribadi dalam konteks organisasi, serta sifat organisasi itu sendiri. Setiap kali orang berinteraksi dalam organisasi, banyak faktor yang ikut bermain. Studi organisasi berusaha untuk memahami dan menyusun model-model dari faktor-faktor manusia/SDM dan psikologi yang mempengaruhi organisasi gerakan hubungan antar manusia, motivasi, dan aktualisasi tujuan-tujuan individu di dalam organisasi, dan juga perilaku organisasi dapat memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasinya dan keberhasilan kerja.

Dalam perkembangan organisasi, perilaku organisasi mempunyai peranan penting sebagai pemicu keberhasilan suatu organisasi. Perilaku Organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Perilaku Organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi). Pada perilaku organisasi juga mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi. Disiplin lain yang terkait dengan studi organisasi adalah studi tentang sumber daya manusia, psikologi industry, perilaku organisasi dan komitmen organisasi.

Manajemen didefinisikan sebagai proses kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. (Hersey

dan Blanchard, 1982) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mendefinisikan pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat (pemerintah).

Dari defenisi organisasi dan pemerintahan di atas, maka dapat disimpulkan; yang dimaksud dengan organisasi pemerintah adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain dalam suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah.

Kemudian unsur-unsur organisasi menurut Nawawi (2005) adalah sebagai berikut :

1. Manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih.
2. Filsafat yang merupakan dasar organisasi dan norma-norma perilaku.
3. Proses merupakan rangkaian kegiatan bersama atau kerja sama.
4. Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai baik material/finansial maupun non material/non finansial.

Selanjutnya organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi manapun di dunia, karena organisasi pemerintah memiliki tiga hal penting yang merupakan wewenangnya yaitu sebagai berikut :

1. Bila organisasi lain tidak diperkenankan membunuh orang lain bahkan dapat dituntut, maka organisasi pemerintah diperbolehkan biasanya disebut hukum mati.
 2. Bila organisasi lain tidak diperkenankan mengurung orang walaupun dalam waktu yang sangat singkat, maka organisasi pemerintah diperbolehkan biasanya disebut juga penjara atau lembaga pemasyarakatan.
 3. Bila organisasi lain tidak diperkenankan memungut uang dengan paksa tanpa alasan yang jelas karena pemberian jasa tertentu, maka organisasi pemerintah diperbolehkan biasanya disebut dengan pajak.
- (Syafiie, 2004)

Ketentuan pokok kelembagaan pemerintah, adalah menyangkut mekanisme, bentuk, dan susunan kelembagaan daerah beserta perangkatnya. Kelembagaan pemerintahan daerah adalah organisasi yang ada di dalam daerah. Sedangkan perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi terbatas. Provinsi tidak membawahi kabupaten dan kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerja sama, dan/atau kemitraan sesuai kedudukan masing-masing. (Warseno, 2002).

Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. Manajemen baru merupakan suatu masalah yang besar setelah faktor dan sumber daya yang paling sukar untuk dikendalikan dan didayakan, masuk ke dalam kancah karya, yaitu manusia.

Manajemen pemerintahan di Indonesia, koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhannya itu dapat disinkronkan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama. (Syafiie, 2004)

Organisasi pemerintahan secara menyeluruh dilihat dari segi administrasi pembangunan, harus mampu mendesain rencana dan program-programnya yang diharapkan mendorong proses pembangunan. Sebagai contoh pembangunan ekonomi, ini berarti kemampuan untuk mendesain kebijakan dan rencana pembangunan ekonomi. Hal ini memerlukan mekanisme hubungan tata kerja sedemikian rupa, sehingga hasil kebijaksanaan atau rencana pemerintah tersebut tetap bersifat konsisten.

Pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur/pihak/komponen, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Tingkat keterlibatan berbagai komponen tersebut akan terbagi ke dalam berbagai variasi fungsi dan peran. Variasi fungsi dan peran tersebut menyebabkan perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah, diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat dilaksanakan secara sinergis dan harmonis antar komponen-komponen yang berbeda tersebut. (Riyadi dan Bratakusumah, 2003)

Menurut Salam (2004) Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini diperkuat oleh Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/I/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dibentuk dan disusun dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Daerah-daerah tersebut berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain. Daerah provinsi sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Gubernur. Daerah provinsi bukanlah pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan daerah kota.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategi, konservasi, dan standardisasi nasional.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup, kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah (pusat). Dalam mengelola (manajemen) sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya, daerah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah di wilayah laut meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
- b. Pengaturan kepentingan administratif.
- c. Pengaturan tata ruang.
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan sebagaimana pada daerah provinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

2.1.1.7 Analytical Hierarchy Process (AHP)

1. Prinsip – prinsip Dasar *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh *Thomas Saaty* pada tahun 1970-an merupakan suatu metode dalam pemilihan alternatif-alternatif dengan melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana yang digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan berdasarkan ranking.

AHP adalah prosedur yang berbasis matematis yang sangat baik dan sesuai untuk evaluasi atribut-atribut kualitatif. Atribut-atribut tersebut secara matematik dikuantitatif dalam satu set perbandingan berpasangan, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan untuk penyusunan alternatif-alternatif pada urutan ranking/prioritas.

Kelebihan AHP dibandingkan dengan metode yang lainnya karena adanya struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan (*Saaty, 1990*). Karena menggunakan input persepsi manusia, model ini dapat mengolah data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kompleksitas permasalahan yang ada disekitar kita dapat didekati dengan baik oleh model AHP ini. Selain itu AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi- kriteria yang didasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Jadi model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif.

Ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, diantaranya adalah : *decomposition, comparative judgement, synthesis of priority* dan *logical consistency* (*Sri Mulyono, 2007 : 220*).

2. Decomposition

Setelah persoalan didefinisikan, maka perlu dilakukan *decomposition* yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini, maka proses analisis ini dinamakan hirarki (*hierarchy*). Ada dua jenis hirarki yaitu lengkap dan tak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian, dinamakan hirarki tak lengkap.

3. Comparative Judgement

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan tampak lebih baik bila disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks *pairwise comparison*. Pertanyaan yang biasa diajukan dalam penyusunan skala kepentingan adalah :

- a. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin) ?, dan
- b. Berapa kali lebih (penting/disukai/mungkin) ?

Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, seseorang yang akan memberikan jawaban perlu pengertian menyeluruh tentang elemen-elemen yang dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria atau tujuan yang dipelajari. Dalam penyusunan skala kepentingan ini, digunakan acuan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Skala prioritas dalam AHP

Nilai	
1	Sama pentingnya (<i>Equal Importance</i>)
2	Sama hingga Sedikit Lebih penting
3	Sedikit Lebih penting (<i>Slightly more Importance</i>)
4	Sedikit Lebih hingga Jelas lebih penting
5	Jelas lebih penting (<i>Materially more Importance</i>)

6	Jelas hingga Sangat jelas lebih penting
7	Sangat jelas lebih penting (<i>Significantly more</i>
8	Sangat jelas hingga Mutlak lebih penting
9	Mutlak lebih penting (<i>Absolutely more Importance</i>)

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma *reciprocal* artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting daripada j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen i. Disamping itu perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama pentingnya.

4. *Synthesis of Priority*

Dari setiap *pairwise comparison* kemudian dicari *eigen vectornya* untuk mendapatkan *local priority*. Karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesa diantara *local priority*. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan *priority setting*.

5. *Logical Consistency*

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

2.1.2 Pendekatan Empiris

Beberapa studi atau penelitian yang berkaitan dengan kerjasama antardaerah telah dilakukan. Antara lain oleh tim peneliti PKP2A I LAN. Penelitian yang berjudul Hubungan Kerjasama Pembangunan antar Daerah ini mengambil lokus di pemerintah daerah kabupaten/kota di beberapa provinsi yaitu Kota Manado (Sulut), Kota Pontianak (Kalbar), Kota Cirebon (Jabar), Kota Jambi

(Jambi), Kota Palembang (Sumsel), Kota Semarang (Jateng), Kabupaten Madiun (Jatim), dan Kabupaten Badung (Bali).

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi model kerjasama antardaerah yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik. Hasil penelitian ini menyimpulkan 6 (enam) model yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah, yaitu:

1. Kerjasama usaha dengan membentuk kelembagaan baru;
2. Kerjasama usaha tanpa membentuk kelembagaan baru;
3. Kerjasama non usaha dengan membentuk kelembagaan baru;
4. Kerjasama non usaha tanpa membentuk kelembagaan baru (fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat);
5. Kerjasama bantuan teknis (technical assistance);
6. Kerjasama kepanitiaan bersifat ad-hoc.

Penelitian dari Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektor dan Daerah-Bappenas dengan judul Pengembangan Kerjasama Pembangunan Sektor dan Daerah: Persoalan dan Peluangnya. Studi ini menggunakan metode eksplorasi konsep dan desk study, eksplorasi empiris, pengolahan data dan analisis, serta melakukan pendalaman kasus kerjasama pembangunan sektoral dan daerah di lapangan, dengan mengambil lokus/sampel kawasan Merapi Yogyakarta, Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi kawasan Joglo-Semar (Yogyakarta, Solo, dan Semarang), serta pengembangan kawasan Pawonsari yang melibatkan Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Wonosari.

Penelitian ini mengidentifikasi pola kerjasama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi dua yaitu kerjasama antar sektor pada daerah tertentu, dan kerjasama antardaerah. Pertama, kerjasama antar sektor pada daerah tertentu terlihat dari dua contoh kerjasama yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (KTNGM) dan Forum Kemitraan Pembangunan Ekonomi Bali (FKPEB). Pada KTNGM di Provinsi D.I. Yogyakarta, keterlibatan berbagai sektor pemerintah seperti Dinas Kehutanan, Dinas

Pariwisata, Bappeda, mulai level pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten bahkan sampai tingkat desa dalam mengurus penetapan status hukum dan membuat perencanaan tentang pengelolaan dan penataan KTNGM. Sedangkan pada FKPEB yang melibatkan berbagai stakeholder meliputi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. FKPEB berperan sebagai fasilitator kelompok produsen (petani, nelayan, dan pengrajin) dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar berpihak kepada pengembangan ekonomi lokal, serta memfasilitasi peningkatan kompetensi para produsen agar produknya mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.

Kedua, kerjasama antardaerah teridentifikasi ada empat kerjasama di beberapa daerah yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi baik dalam lingkup satu provinsi maupun lintas provinsi. Yaitu (1) pengembangan kawasan segitiga Joglosemar (Jogja, Solo, dan Semarang) yang awalnya justru diinisiasi oleh swasta (2) pengembangan kawasan Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari) yang meliputi tiga provinsi yaitu Jatim, Jateng dan Yogyakarta untuk bersama-sama mengembangkan potensi dan memecahkan permasalahan bersama di kawasan tersebut; (3) kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran; (4) pengelolaan program transmigrasi di Kalimantan Timur bekerjasama dengan pemerintah daerah pengirim transmigran seperti Jawa Barat, Jatim, dan Bali.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yaitu: **pertama**, diperlukan Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah (KPSD) yang bisa dilakukan berdasarkan pokok persoalan yang sedang berkembang, seperti soal sektoral, eksternalitas daerah otonom dan fungsi interdependen antardaerah. **Kedua**, tanggapan yang muncul atas pokok persoalan tersebut di antaranya: (1) monitoring perkembangan sektoral dan daerah; (2) analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah. **Ketiga**, berbagai bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan KPSD antara lain; (1) keterlibatan pihak swasta; (2) kesadaran untuk saling bekerja sama; (3) inisiator kerjasama sektor dan daerah. **Keempat**, terdapat kendala pelaksanaan dan pengembangan KPSD, yakni: (1) perbedaan

kepentingan dan prioritas; (2) besarnya harapan terhadap pemerintah pusat; (3) kuatnya peran pemerintah pusat; (4) permasalahan dana; dan (5) dokumen legalitas sebagai payung kerja sama.

Dari uraian dua penelitian di atas terlihat bahwa kedua penelitian tersebut mengidentifikasi pola-pola hubungan kerjasama antar daerah, kendala yang dihadapi, dan model hubungan kerjasama yang berpotensi atau bisa diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai alternatif bentuk kerjasama. Tinjauan empiris tersebut diatas dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melaksanakan Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur.

2.2 Kerangka Konsep

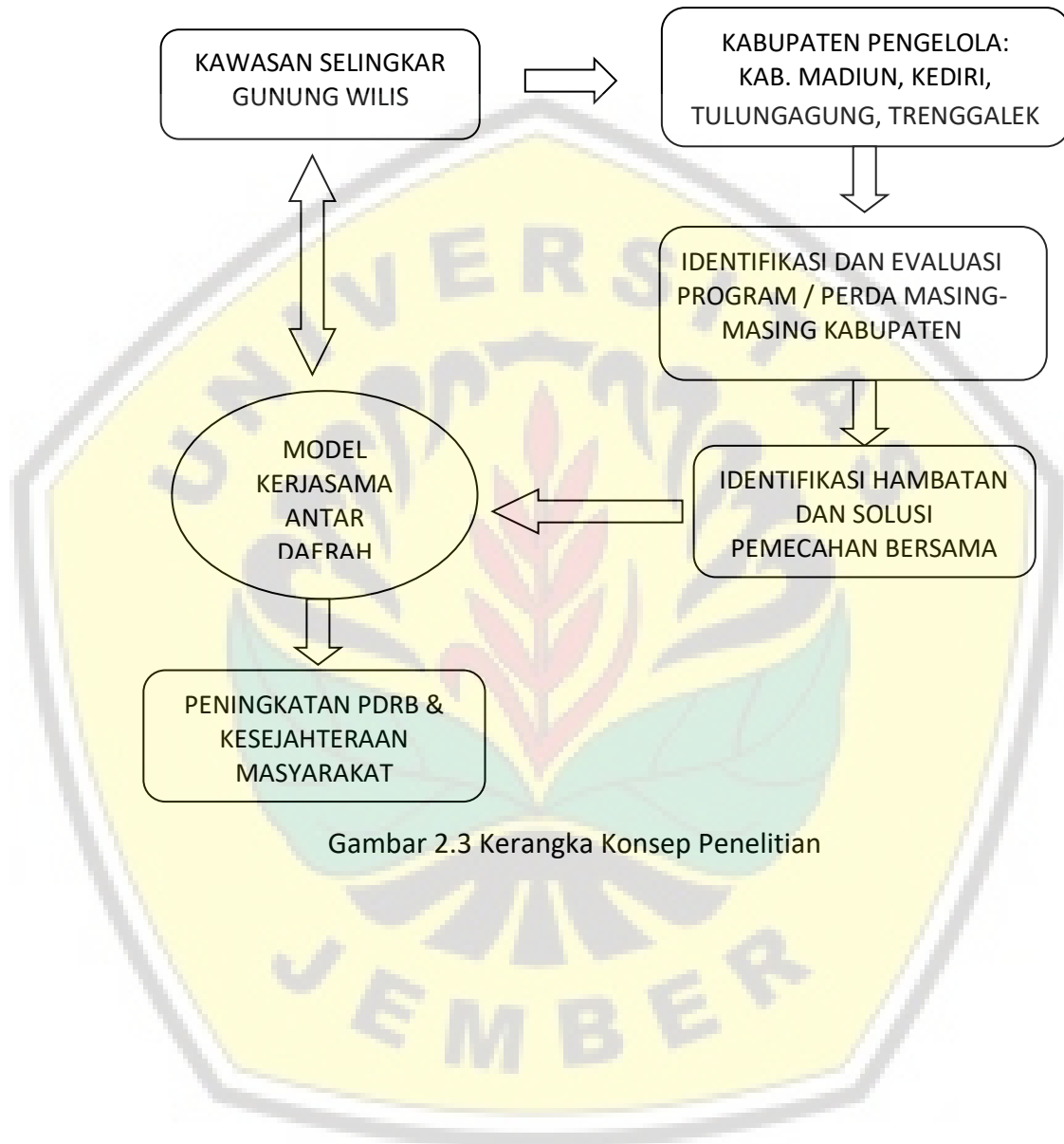
Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah dimulai dari permasalahan Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur. Dimana kawasan ini memiliki potensi yang besar akan tetapi kurang optimal dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan bahwa Kawasan Selingkar Gunung Wilis berada di 6 (enam) wilayah kabupaten yang berbeda. 4 (empat) kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

Sampai dengan saat ini belum ditemukan model yang sesuai dalam penataan kawasan ini. Maka dari itu perlu adanya model kerjasama antar daerah pengelola agar potensi Kawasan Selingkar Gunung Wilis khususnya Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek dapat optima pengelolaannya.

Perlu adanya identifikasi kondisi eksisting dan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur umumnya dan pemerintah daerah lokus penelitian khususnya. Selain itu juga perlu identifikasi kerjasama antar pemerintah daerah yang dilakukan saat ini serta hambatan dalam pelaksanaannya untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Setelah diketahui identifikasi kondisi eksisting, kerjasama antar daerah yang telah dilakukan dan

hambatannya maka tujuan utama penelitian ini adalah tersusunnya rancangan Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur

Adapun skema kerangka konsep dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian berjudul Kajian Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur ini adalah perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Jenis kuantitatif dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai data, informasi dan fenomena yang ada berkaitan dengan kerjasama antardaerah di lokus penelitian (Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek). Jenis kualitatif lebih menitikberatkan analisis yang lebih mendalam untuk mengolah data-data, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

Pendekatan kualitatif juga dilakukan dengan evaluasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan evaluasi formal. Menurut William N. Dunn, evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan atas dasar tujuan dan sasaran program kebijakan yang telah diinformasikan secara formal kepada publik. Tujuan dan sasaran tersebut bisa dilacak dari berbagai peraturan perundangan, dokumen-dokumen program serta wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan administrasi.

3.2 Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 4 (empat) kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Penentuan daerah penelitian ini menggunakan *purposive method* dimana pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kabupaten yang memiliki wilayah di selingkar Gunung Wilis.

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan kalender terhitung sejak ditandatanganinya surat kerjasama pelaksanaan penelitian. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan Oktober 2016.

3.3 Teknik Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Terdapat dua jenis sumber data yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi (Bappeda dan instansi terkait lainnya) serta mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan desain pengembangan kawasan di suatu wilayah. Selain itu sumber data sekunder berasal dari data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan topik penelitian. Seperti kondisi sumberdaya alam, *product domestic regional bruto* dan lainnya.

Data sekunder yang dikumpulkan akan disimpulkan dengan metode induksi, yaitu penarikan kesimpulan dari fenomena khusus yang ada di daerah lokus kemudian dilakukan generalisasi untuk menilai pengelolaan kawasan secara parsial wilayah untuk menentukan model kerjasama antar daerah di kawasan selingkar wilis secara obyektif.

Selanjutnya, data primer bersumber dari responden yang ditentukan dengan metode *purposive*. Responden yang dipilih adalah pegawai pemerintah khusus yang memahami Rencana Strategi Pembangunan Daerah di Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, wawancara dengan kuisisioner, observasi dan FGD.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indrianto dan Supomo, 2002). Teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan intensif

sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail. Wawancara dilakukan kepada informan yang memahami Rencana dan Strategi Pembangunan Daerah di masing-masing lokasi penelitian seperti Kepala Bappeda atau person yang ditunjuk untuk menggantikannya dan juga anggota dewan bidang ekonomi. Keabsahan data dilakukan dengan mengecek ulang kepada informan kunci lain (triangulasi).

b. Kuesioner

Kuesioner adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk penelitian ini disusun dengan menggunakan unsur-unsur perencanaan pengembangan wilayah dengan *guidance Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Kuesioner ini ditanyakan kepada pengambil keputusan di Badan Perencana Daerah seperti Kepala Bappeda atau person yang ditunjuk untuk menggantikannya, anggota dewan bidang ekonomi.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan peninjauan secara langsung untuk mengetahui kondisi kawasan di selingkar gunung wilis di kabupaten sampel.

d. FGD (*focus Group discussion*)

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbatas dalam forum FGD (*focus Group discussion*) yang melibatkan para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain wakil dari Satuan Kerja Perangkat Dinas yang berperan penting dalam Rencana Pembangunan Daerah di lokus penelitian dengan tim peneliti dari perguruan tinggi.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode analisis data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- I. Untuk mengidentifikasi; kondisi eksisting dan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur saat ini digunakan analisis deskriptif kualitatif.
- II. Untuk mengidentifikasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur digunakan metode evaluasi.
- III. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur digunakan metode deskriptif kualitatif.
- IV. Untuk merancang Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur digunakan pendekatan Analisis Hirarki Proses (AHP).

Langkah-langkah dalam metode AHP :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan alternatif solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub-tujuan, kriteria dan memungkinkan alternatif pada tingkat kriteria yang paling bawah.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgement dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibanding elemen lainnya.
4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya sebanyak $n \times ((n-1)/2)$ buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan.

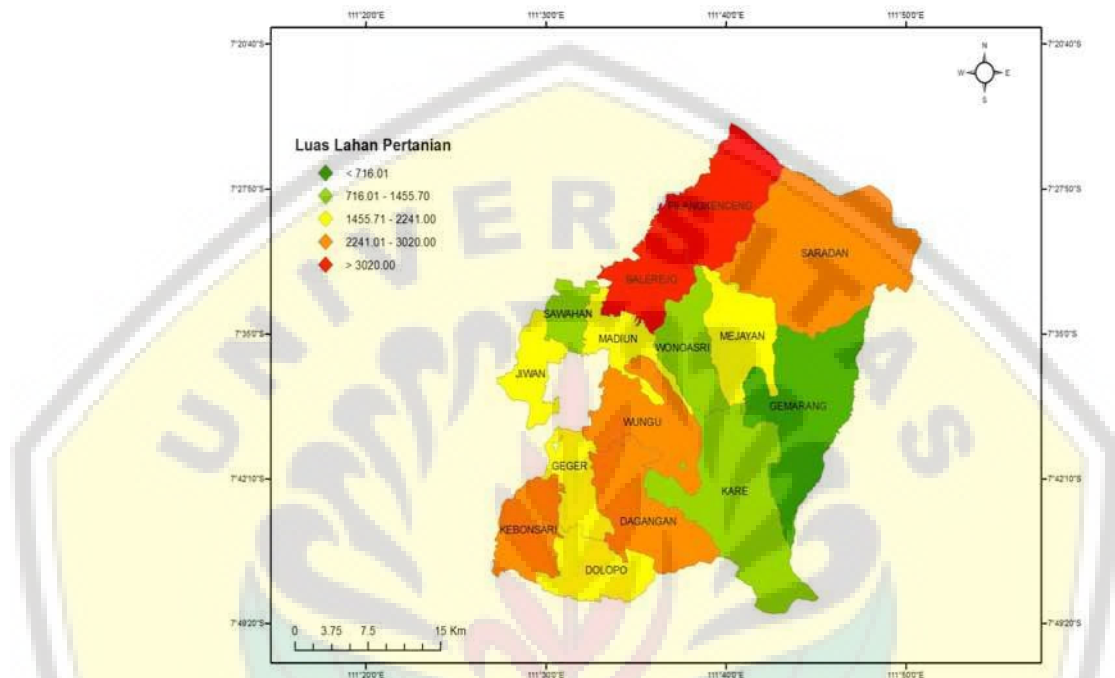
5. Menghitung nilai eugen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten pengambilan data diulangi.
6. Mengulangi langkah c, d, dan e untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis judgment dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
8. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10% maka penilaian data judgment harus diperbaiki.
9. Saaty (1993) menetapkan skala kuantitatif 1 sampai 9 untuk membandingkan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain.

Tahap Identifikasi Masalah dalam analisis AHP:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi-solusi yang diinginkan.
2. Dalam tahap ini peneliti berusaha menentukan masalah yang akan dijawab (dipecahkan) secara jelas, detail dan mudah dipahami.
3. Dari masalah yang ada dicoba ditentukan solusi-solusi (hipotetik) yang mungkin cocok untuk menyelesaikan masalah itu.
4. Solusi dari suatu masalah mungkin berjumlah lebih dari satu.
5. Solusi-solusi (hipotetik) ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Madiun



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Madiun

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Madiun terletak di sekitar $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 48' 30''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 25' 45'' - 111^{\circ} 51'$ Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah $1.010,86 \text{ Km}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Bojonegoro
- Sebelah Timur : Kab. Nganjuk
- Sebelah Selatan : Kab. Ponorogo
- Sebelah Barat : Kab. Magetan dan Kab. Ngawi

Jarak antara Kabupaten Madiun dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 175 Km ke arah timur, sedangkan jarak dengan ibukota negara kurang lebih 775 Km dengan arah sebaliknya.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kare, sebagian besar wilayahnya terdiri atas hutan dan perbukitan. Sebaliknya yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Sawahan.

4.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan Muharam, tahun 1568 Masehi tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568/ Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487.

Sejarah Kabupaten Madiun berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke Desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran surya Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kyai Rekso Gati. (Sogaten = tempat rekso Gati) Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang Bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Pura- baya yang dipegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518-1568.

Pada Tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke Desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590. Pada Tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timoer (Panembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Djumilah (Raden Adjeng Doemilah). Bupati inilah selaku senopati manggalaning.

Pada Tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada Tahun 1590, dengan pura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawidjaja

dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan disekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun)

Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaja dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaja dan diboyong ke istana Mataram di Plered (Jogjakarta) sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 Nopember 1590 Masehi nama “Purbaya” diganti menjadi “Madiun” (Dikutip dari <http://id.wikipedia.org>)

Tahun 2008 H. Muhtarom, S. Sos terpilih menjadi Bupati Madiun ke 37, menggantikan KRH. Djunaidi Mahendra, SH, M.Si, sampai sekarang. Dalam menjalankan roda pemerintahan di Tahun 2014, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan 9.676 PNS yang rata rata berpendidikan terakhir Sarjana dan SMA.

Kabupaten Madiun terbagi dalam 15 Kecamatan. Tiap-tiap Kecamatan terbagi dalam desa atau kelurahan. Total terdapat 198 desa dan 8 kelurahan. Dalam pemerintahan di Tahun 2014 ini, terdapat 2.117 perangkat desa termasuk kepala desa/lurah. Rukun Warga dan Rukun Tetangga tetap sebagai satuan wilayah terkecil. Menurut Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, pada Tahun 2014 ini terdapat 1.225 RW dan 4.784 RT.

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan kenaikan lebih dari 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kesadaran masyarakat membayar pajak tentunya akan membuat pemerintah semakin leluasa mengatur anggaran untuk kemakmuran bersama.

4.1.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Aspek kependudukan merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi sumber daya pembangunan yang optimal jika pembinaanya tepat dan terarah. Namun bisa juga menjadi ancaman serius jika pemerintah tidak bijak dalam menghadapinya. Dengan total penduduk pada akhir tahun 2014 sebesar 720.768 jiwa, Kabupaten

Madiun mencatatkan sex ratio sebesar 100,46 yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah

Salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap tingginya jumlah laki-laki dibandingkan perempuan adalah tercatat kelahiran bayi laki-laki besar dibandingkan dengan bayi perempuan pada tahun 2014.

Dinamika jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor alami (kelahiran dan kematian) serta non alami (migrasi masuk dan keluar). Tahun 2014 tercatat ada 4.221 kelahiran, 255 kematian, 1.015 migrasi masuk dan 4.361 migrasi keluar.

Dengan luas wilayah sebesar 1.010,86 km² tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Madiun sebesar 706 Jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Geger. Sebaliknya kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kare.

Menurut BPS, Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2014 tercatat sebanyak 527.879 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 362.786 mencatatkan angka TPT sebesar 3,38 dengan TPAK sebesar 68,73 persen. Sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan merupakan sektor yang dominan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Madiun. Tercatat sebanyak 165.060 tenaga kerja bekerja di sektor ini.

Jumlah TKI pada tahun 2013-2014 turun sebesar 7% dari 2.754 pada tahun 2013 menjadi 2.537 pada tahun 2014. Dengan tiga negara tujuan terbanyak yaitu Taiwan, Hongkong dan Singapura.

4.1.4 Pertanian

Penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga sesuai potensi daerah yang agraris maka mata pencaharian penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar adalah bekerja di bidang pertanian. Baik sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap alias buruh tani.

Berdasarkan data luas panen dan produksi untuk sektor tanaman pertanian dalam hal ini mencakup tanaman pangan, tanaman obat, tanaman buah, dan tanaman sayur mengalami peningkatan jumlah luas panen dan

produksi di tahun 2014. Dimana, komoditi padi masih memberikan kontribusi luas panen dan hasil produksi terbesar di Kabupaten Madiun

Pada sektor perkebunan terbesar seperti kopi, karet, dan cengkeh mengalami penurunan hasil produksi di tahun 2014. Akan tetapi untuk komoditi porang mengalami kenaikan nilai produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada, untuk ketersediaan ternak di Kabupaten Madiun mayoritas mengalami peningkatan angka jumlah hampir di setiap jenis ternak dan unggas. Untuk produksi daging, kulit, susu, dan telur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai konsumsi daging dan ikan untuk Kabupaten Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.1.5 Perdagangan

Jumlah usaha perdagangan besar pada tahun 2014 tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan jumlah pedagang menengah dan kecil mengalami peningkatan. Stok beras di gudang bulog pada tahun 2014 mengalami naik turun setiap bulannya. Stok tertinggi terjadi pada bulan Juli. Yang menggembirakan adalah tren jumlah pengusaha kecil yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM selama Tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan. Semoga hal tersebut akan semakin menggairahkan sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun.

4.1.6 Perhubungan

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk mempermudah mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya.

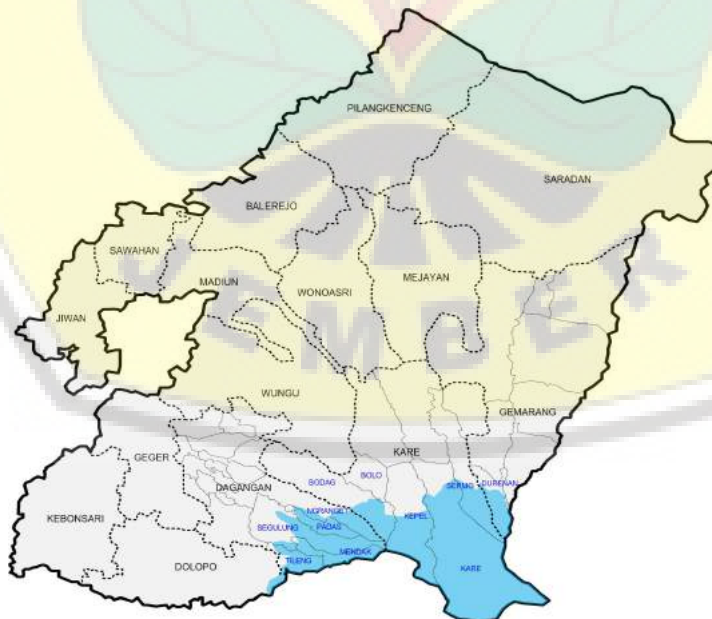
Panjang jalan menurut kondisi permukaan tanah dan jenis permukaan jalan dapat dicermati pada Tabel 8.1.1 dan 8.1.2. Dari grafik dapat dicermati bahwa kondisi jalan yang rusak berat semakin berkurang tiap tahun, digantikan dengan kenaikan pada jalan dengan kondisi baik.

4.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian suatu wilayah berkembang sesuai dengan nilai historis, geografis dan kultur masyarakatnya. Dalam perkembangannya, lambat laun akan memberikan corak warna bagi struktur ekonomi suatu wilayah. Kabupaten Madiun sejak dulu sektor pertaniannya berkembang cukup baik. Dari tahun ke tahun penyumbang nilai PDRB terbesar di Kabupaten Madiun adalah Sektor Pertanian. Disusul kemudian oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di urutan kedua. Yang paling sedikit adalah sumbangan dari sektor Pertambangan dan Penggalian. Akan tetapi sama seperti pada publikasi tahun lalu, PDRB sektor pertanian perannya semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Madiun perlu pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan perkembangan teknologi sehingga dapat menguatkan sistem ketahanan pangan, agropolitan dan agrobisnis.

4.1.8 Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Madiun

Bagian wilayah di Kabupaten Madiun yang termasuk dalam wilayah selingkar Gunung Wilis adalah seperti tergambar pada peta berikut:



Gambar 4.2 Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Madiun

4.2. Gambaran Umum Kabupaten Kediri



Gambar 4.3 Peta Wilayah Kabupaten Kediri

4.2.1 Kondisi Geografis

Posisi geografi Kabupaten Kediri terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ sampai dengan $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ sampai dengan $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten, yakni :

- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Utara : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang
- Sebelah Timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung

Kondisi topografi terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 31°C dengan tingkat curah hujan rata-rata sekitar 1652 mm per hari. secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386.05 KM² atau + 5%, dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.

Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berbeda sifatnya, yaitu Gunung Kelud di sebelah Timur yang bersifat Vulkanik dan Gunung Wilis di sebelah barat yang bersifat non vulkanik, sedangkan tepat di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri melintas sungai Brantas yang membelah Wilayah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yaitu bagian Barat sungai Brantas:

merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok. dan bagian timur Sungai Brantas

4.2.2 Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, yang tergabung dalam 4 wilayah Koordinator Kecamatan yaitu:

1. Koordinator Kecamatan Kediri, mengkoordinasi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Tarokan, Grogol, Ngasem, dan Gampengrejo.
2. Koordinator Kecamatan Ngadiluwih, mengkoordinasi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngadiluwih, Wates, Ngancar, Kandat, Kras, dan Ringinrejo.
3. Koordinator Kecamatan Pare, mengkoordinasi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pare, Gurah, Puncu, Plosoklaten, Kepung, Badas, dan Kandangan.
4. Koordinator Kecamatan Papan, mengkoordinasi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Papan, Pagu, Kayenkidul, Plemahan, Kunjang, dan Purwoasri.

4.2.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Penduduk Kabupaten Kediri jumlahnya sebesar 1.603.041 jiwa dengan luas wilayah 1.386,05 Km² maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.157 jiwa per Km.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012*	2013**
1.	Laki-laki	731.222	724.873	812.207
	Jumlah	1.478.103	1.406.038	1.603.041
	<i>Sex ratio (%)</i>	97,90	106,42	102,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Kediri, 2014

4.2.4 Pertanian

Keadaan pertanian di Kabupaten Kediri sebagian besar didominasi pertanian tanaman pangan dengan padi masih merupakan tanaman pangan utama dengan luas panen 51.278 Ha pada tahun 2014. Jagung menempati posisi kedua dengan luas panen 50.156 Ha pada tahun 2014. Kecamatan yang menjadi sentra produksi padi adalah Kecamatan Purwoasri, disusul Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Badas.

Berdasarkan kondisi geografis yang sesuai untuk pertanian maka mata pencaharian penduduk Kabupaten Kediri sebagian besar adalah bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan data luas panen dan produksi untuk sektor tanaman pertanian dalam hal ini mencakup tanaman pangan utama mengalami penurunan jumlah luas panen dan produksi di tahun 2014. Hal ini dapat diakibatkan salah satunya oleh besarnya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kediri menjadi lahan non pertanian.

Pada sektor perkebunan, tanaman yang banyak diusahakan adalah tanaman tebu dengan luas panen terbesar ada pada Kecamatan Wates, Kecamatan Kandat, dan Kecamatan Kras. Selain Tebu juga diusahakan tanaman Kakao dengan kecamatan penghasil seperti Kecamatan Kepung, Kecamatan Mojo, Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ringinharjo.

4.2.5 Aspek Perdagangan

Keadaan sektor perdagangan di Kabupaten Kediri dapat digambarkan dengan banyaknya pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kediri Tahun 2015 dapat diketahui bahwa jumlah pengusaha kecil adalah 1.178, pengusaha menengah sejumlah 48 buah dan pengusaha besar sejumlah 11 buah.

Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengusaha adalah sebagai berikut :

- Pengusaha Kecil : Modal Usaha < 200 juta rupiah
- Pengusaha Menengah : Modal Usaha < 200 s/d 500 juta rupiah

- Pengusaha Besar : Modal Usaha > 500 juta rupiah
- Modal Usaha tidak termasuk Tanah dan Bangunan

4.2.6 Aspek Perhubungan

Kondisi sektor perhubungan di Kabupaten Kediri ditunjukkan dengan perkembangan jalan dan jembatan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Perkembangan Jalan dan Jembatan Kabupaten Kediri
Tahun 2011-2013**

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013
1. Total panjang jalan Kabupaten	Km	2 341.53	2 349.70	2,428.78	2 428,78
2. Panjang jalan mantap	Km	1 576.46	1 674.89	1,896.63	2 046,25
3. Panjang jalan beraspal	Km	2 104.41	2 170.11	2,274.01	2 350,60
4. Jumlah jembatan	Buah	291.00	293.00		
5. Jumlah jembatan yang ditangani	Buah	17.00			
6. Panjang Jembatan Kondisi Baik	Buah	2 537.94	2 715.40		
7. Panjang Jembatan yang Ditangani	Buah	100.75			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kediri, 2015

4.2.7 Aspek PDRB

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri dimaksudkan sebagai usaha pemecahan yang solutif dan antisipatif bagi kepentingan masyarakat. Pembangunan di Kabupaten Kediri pada hakekatnya adalah pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bertahap, sehingga pada dasarnya pembangunan dari suatu tahap merupakan kelanjutan dan peningkatan serta penyempurnaan dari pembangunan tahap sebelumnya. Pembangunan bidang ekonomi sampai dengan tahun ketiga Pembangunan lima Tahun Keenam telah menunjukkan Pertumbuhan ekonomi cukup pesat , namun akhir Pembangunan Lima Tahun

Keenam telah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara mencolok di Kabupaten Kediri yang diakibatkan oleh krisis ekonomi . Krisis ini telah membawa dampak luas dalam semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri , bahkan mempengaruhi kelangsungan pembangunan dan pencapaian sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam .

Dalam rangka mempertahankan, memelihara, dan menjamin kesinambungan pembangunan dan pencapaian sasaran Pembangunan Daerah, maka perlu disusun perubahan mendasar di segala aspek kehidupan terutama aspek politik, ekonomi dan aspek hukum yang dilandasi aspek moral.Oleh karena secara lebih tegas, arah kebijakan pembangunan daerah diletakkan untuk memperkokoh lima prinsip utama , yakni :

Pertama. Pembangunan Daerah haruslah dibangun di atas prinsip-prinsip keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan yang menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dalam proses pembangunan .

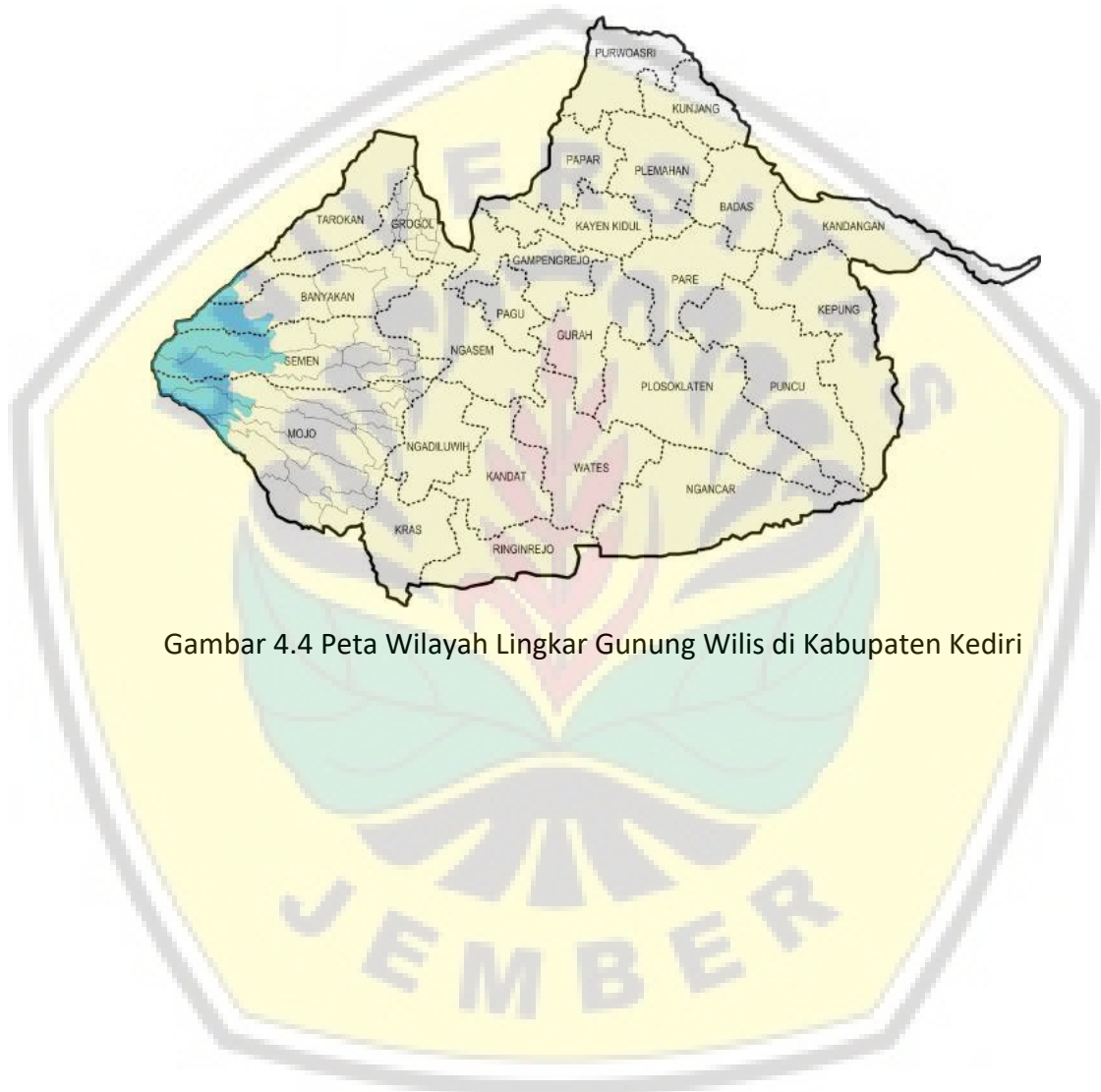
Kedua. Menumbuhkan iklim pembangunan yang kondusif dengan menjamin adanya kepastian hukum serta mengembangkan system pembangunan yang lebih transparan dan demokratis sehingga akan terwujud partisipasi rakyat yang optimal dan bertanggungjawab.

Ketiga. Pemulihan ekonomi dalam rangka memperkuat Fundamental ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat , optimalisasi Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pembangunan berbasis pertanian maju, perdagangan , industri yang tangguh berorientasi pada mekanisme pasar menuju ekonomi yang berkeadilan dengan memperluas penyebaran sumber dan aset-aset produksi guna memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi semua pelaku usaha, terutama usaha kecil , menengah dan koperasi .

Keempat. Mewujudkan Aparatur Negara yang mampu melayani masyarakat secara proaktif, professional,transparan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

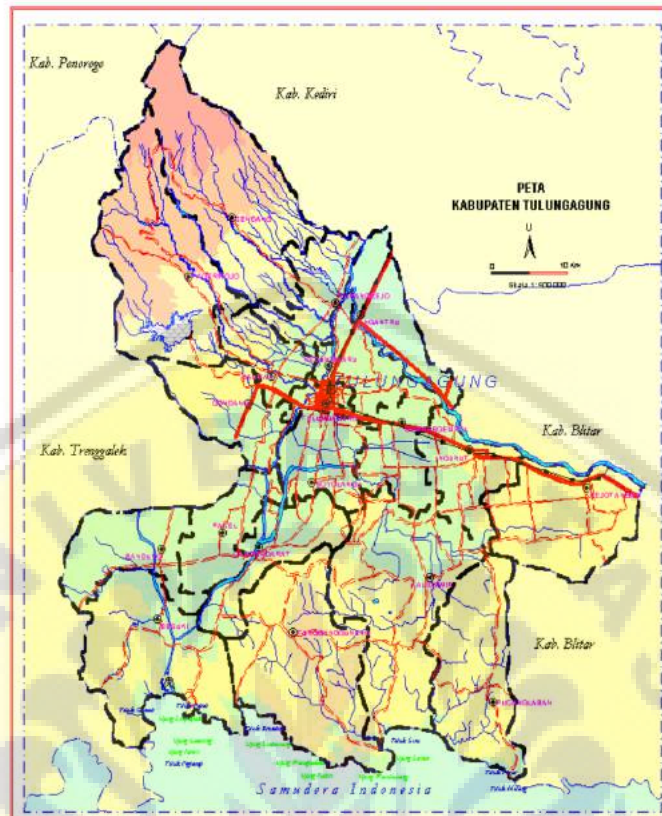
Kelima. Perwujudan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab didukung oleh masyarakat guna membangun kembali legitimasi bagi pemerintah Daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.8 Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Kediri



Gambar 4.4 Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Kediri

4.3. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung



Gambar 4.5 Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung

4.3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi $111^{\circ} 43'$ sampai dengan $112^{\circ} 07'$ bujur timur dan $7^{\circ} 51'$ sampai dengan $8^{\circ} 18'$ lintang selatan. Batas wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Blitar.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai $1.055,65 \text{ Km}^2$ habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan. Topografi Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.

Hari dan curah hujan antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Hari hujan di Kabupaten Tulungagung terbesar ada di bulan Desember dan terkecil ada di bulan September. Sedangkan curah hujan terbesar ada di bulan Desember dan Januari sedangkan yang terendah ada di bulan September dan Oktober. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2014 adalah 126 mm, ini berarti lebih rendah di banding tahun 2013 yang sebesar 184 mm. Curah hujan dan hari hujan tidak merata antar waktu dan antar daerah, sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang saling bertentangan, yaitu misalnya terjadi banjir di suatu daerah sementara di daerah lain terjadi kekeringan pada saat yang sama. Oleh karena itu harus selalu diwaspadai bulan-bulan hari hujannya banyak dan sedikit, sehingga dapat diminimalkan terjadinya suatu bencana.

4.3.2 Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/kota di Jawa Timur pada umumnya. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka peran

Pemerintah Daerah menjadi lebih besar karena sebagian besar kewenangan dari Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi.

Unit Pemerintahan Daerah di bawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis kedalam desa/ kelurahan. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.851 Rukun Warga (RW) dan 6.405 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

Pemerintahan Daerah akan berjalan baik apabila tersedia aparatur pemerintah yang memadai. Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi jumlah. Tidak seluruh perangkat desa/kelurahan terisi, namun hal ini bukanlah halangan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, apabila tenaga yang ada dioptimalkan, dan ini merupakan pemecahan masalah yang dilakukan saat ini.

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil sepenuhnya apabila desa/kelurahan sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Berdasarkan Inmendagri 8 tahun 1996 tentang juklak kependagri 25 tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Klasifikasi desa/kelurahan di Tulungagung terdapat 200 desa swakarsa dan 71 desa swasembada.

Sebagai unit terkecil dari pemerintahan, setiap desa mempunyai proyek pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain bidang sosial budaya, ketahanan masyarakat, usaha ekonomi rakyat, sumber daya pemukiman dan teknologi tepat guna.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Tulungagung adalah 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu kecamatan Besuki, Bandung, Pakel, Campurdarat, Tanggunggunung, Kalidawir, Pucanglaban, Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Boyolangu, Tulungagung, Kedungwaru, Ngantru, Karangrejo, Kauman, Gondang, Pagerwojo, Sendang. Total jumlah desa di Kabupaten Tulungagung adalah 271 desa, dimana kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Gondang dengan 20 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung dengan 7 desa.

4.3.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu masalah sosial yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk, serta masalah kualitas penduduk sebagai pendukung pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik. Namun sebaliknya, dapat juga menjadi beban pembangunan apabila kualitasnya rendah. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi menuntut penyediaan lapangan kerja dan fasilitas-fasilitas sosial, misalnya perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil sensus penduduk akhir tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0.65 persen dibanding akhir tahun 2013, yaitu dari 1.009.411 jiwa menjadi 1.015.974 jiwa di tahun 2013, yang terbagi atas laki-laki 495.083 jiwa dan perempuan 520.891 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 962 jiwa/km². Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 4.000 jiwa/km² namun di sisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km².

Salah satu tantangan besar bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja/usaha yang layak bagi angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat karena perubahan struktur umur penduduk. Tantangan ini mencakup dua aspek sekaligus, penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup layak. Oleh karena itu pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan dari penerapan Upah Kerja Minimum. Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2014 sebesar 4.207 jiwa, yang didominasi lulusan SLTP sebesar 47,16 persen. Pencari kerja yang telah disalurkan menurut lapangan pekerjaan terbesar di sektor kegiatan lainnya yaitu sebesar 56,07 persen.

4.3.4 Pertanian

Dalam pembangunan yang semakin pesat di berbagai bidang terutama di sektor pertanian membutuhkan faktor-faktor pendukung guna meningkatkan hasil produksi, khususnya di bidang pertanian tanaman pangan dengan didukung teknologi pertanian yang memadai.

1. Tanaman bahan makanan

Tanah/Lahan menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah. Penggunaan tanah sawah menurut jenis pengairannya terdiri dari sawah dengan pengairan teknis, sawah dengan pengairan setengah teknis, dan sawah dengan pengairan sederhana. Sedangkan tanah bukan sawah terdiri dari pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebun/huma, padang rumput, tambak dan kolam/tebat.

Data pertanian tanaman bahan makanan meliputi luas panen, produksi, produktifitas dari tanaman padi, palawija, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Disamping itu juga meliputi data penangkar dan produksi bibit jeruk dan jumlah alat- alat pertanian. Data ini merupakan data sekunder dari Dinas Pertanian.

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk memelihara kemandirian swasembada pangan. Pada tahun 2014 hampir semua produksi komoditi pertanian mengalami peningkatan. Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagung menunjukkan luas panen tanaman sayuran mengalami kenaikan. Beberapa tanaman sayuran mengalami peningkatan luas panen dan ada juga yang mengalami penurunan. Tanaman sayuran yang mengalami peningkatan luas panen produksinya juga mengalami peningkatan yaitu bawang merah, bawang daun, bayam, buncis, cabe rawit, kangkung dan lobak. Sedangkan tanaman sayuran yang luas panennya turun sehingga produksinya juga mengalami penurunan yaitu kacang panjang, kubis, sawi, terung dan sayuran lainnya. Produksi tanaman buah-buahan yang mengalami kenaikan adalah mangga, Rambutan, jambu, pepaya, pisang, salak, belimbing dan buah lainnya.

2. Perikanan

Data statistik Perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Statistik Perikanan dibedakan atas data perikanan laut dan perikanan darat. Yang tercakup dalam perikanan darat adalah penangkapan ikan di perairan umum, budidaya pemeliharaan ikan di tambak, kolam, keramba dan sawah.

Produksi ikan laut pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 43,78 persen dan nilai produksinya juga mengalami penurunan sebesar 35,90 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini disebabkan menurunnya produksi ikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemanfaatan kolam untuk budidaya ikan air tawar di Kabupaten Tulungagung ada dua macam yaitu untuk menghasilkan ikan konsumsi dan untuk menghasilkan ikan hias. Jenis-jenis ikan yang diusahakan pada kolam ikan konsumsi ini antara lain adalah tombro, nila, lele dan gurami. Sedangkan jenis-jenis ikan hias air tawar merupakan produk unggulan Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2014 ini mempunyai nilai produksi yang tinggi yaitu sebesar Rp.171.441.620.000,-.

3. Peternakan

Data Populasi Ternak merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Peternakan. Data peternakan meliputi populasi dan produksi ternak besar, ternak kecil dan unggas serta produksi telur. Populasi ternak besar mengalami kenaikan sebesar 8,46 persen dibanding tahun 2013. Hal ini dikarenakan meningkatnya populasi sapi, sapi perah dan kerbau. Populasi ternak unggas di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2013 mengalami kenaikan di hampir semua jenis ternak dengan kenaikan terbesar pada ternak itik yaitu sebesar 13,19 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan produksi, kulit mengalami peningkatan 5,98 persen dan susu mengalami peningkatan sebesar 21,45 persen.

4. Perkebunan

Perkebunan menyajikan data luas areal dan produksi berdasarkan jenis perkebunan. Perkebunan dapat digolongkan dalam 2 kategori, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dimana perkebunan besar terdiri dari perkebunan milik pemerintah dan perkebunan swasta. Perkebunan besar adalah usaha perkebunan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum di atas tanah negara yang mendapat ijin usaha dari instansi yang berwenang. Diluar batasan tersebut merupakan perkebunan rakyat. Data ini merupakan data sekunder dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung luas areal tanaman perkebunan tidak mengalami perubahan. Areal tanaman perkebunan besar di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai areal terluas adalah perkebunan kelapa yaitu sebesar 1.661 Ha disusul perkebunan karet sebesar 472 Ha. Dan untuk produksi tanaman perkebunan yang mempunyai produksi terbesar adalah perkebunan kelapa yaitu sebesar 18.247,04 ton dan yang kedua produksi perkebunan karet sebesar 295 ton.

Untuk tanaman perkebunan rakyat yang mempunyai areal tanaman terluas adalah perkebunan kelapa yaitu sebesar 18.333,00 Ha disusul

perkebunan tebu sebesar 6.371,00 Ha. Sedangkan untuk produksi terbesar adalah tanaman tebu sebesar 51.151 ton. Produksi terbesar kedua adalah tanaman kelapa yaitu sebesar 23.934 ton.

Pada tahun 2014 nilai produksi terbesar untuk tanaman perkebunan rakyat adalah tebu dalam bentuk batang basah dengan nilai produksi 2.633.812 (juta rupiah) dan yang kedua kelapa dalam bentuk kopra dengan nilai 215.406 (juta rupiah).

5. Kehutanan

Data Statistik kehutanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Perum Perhutani. Hutan dibedakan menurut fungsinya yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata dan hutan lainnya. Data kehutanan meliputi produksi dan luas tebangan berdasarkan komoditinya. Produksi hutan di Kabupaten Tulungagung meliputi kayu pertukangan (Jati dan rimba), kayu bakar, kelapa dan getah pinus. Selama tahun 2013 produksi tertinggi adalah jati dengan nilai Rp.2.418.445.500.000,-.

4.3.5 Perdagangan

Data mengenai perdagangan bersumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung meliputi jumlah perdagangan menurut jenisnya untuk tiap kecamatan, jenis perdagangan, ekspor menurut eksportir dan jenis komoditi.

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup terarah dalam penciptaan lapangan usaha serta peningkatan pendapatan. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.

Berdasarkan bentuk usaha, perdagangan di Kabupaten Tulungagung yang terbesar bentuk usahanya adalah perorangan yaitu sebesar 830 usaha,

yang kedua CV sebesar 274 usaha dan yang ketiga BUL yaitu sebesar 223 usaha. Sedangkan menurut golongan usaha dibedakan menjadi perdagangan besar, menengah dan kecil yang masing-masing adalah sebesar 65 usaha, 185 dan 1.214 usaha.

Dalam upaya mengembangkan ekspor di Kabupaten Tulungagung masih ada kendala yang dihadapi yaitu masih lemahnya daya saing produk ekspor karena belum sesuai dengan mutu internasional. Nilai ekspor Kabupaten Tulungagung pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu dari Rp. 11.449.426.000,- pada tahun 2013 menjadi Rp. 9.411.781.000,- pada tahun 2014.

Ekspor terbesar dilakukan oleh perusahaan Abimanyu Stone yang memproduksi Mozaik dengan tujuan negara Jerman, Brazil dan Dubai dengan nilai ekspor sebesar 47,92 persen dari total nilai ekspor.

4.3.6 Perhubungan

Berhasil tidaknya suatu pembangunan tidak bisa terlepas dari lancarnya aktifitas masyarakat di segala bidang. Beberapa faktor yang dapat memperlancar aktifitas masyarakat tersebut antara lain : jalan, sarana angkutan dan juga sarana telekomunikasi.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting guna memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Berdasarkan data dari Dinas PU/PPW Kabupaten Tulungagung panjang jalan raya di Kabupaten Tulungagung mencapai 2.063,44 Km yang terbagi atas jalan kabupaten 2.007,18 Km, jalan provinsi 9,57 Km dan jalan negara 46,70 Km. Untuk jalan kabupaten kondisi jalan terbagi menjadi beberapa kondisi yaitu kondisi baik 20,78 persen, kondisi sedang 45,66 persen, kondisi rusak ringan 13,66 persen dan kondisi rusak berat 19,90 persen. Untuk jalan

negara dan jalan provinsi kondisi jalannya sedang.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 83,88 persen dibanding dengan tahun 2013. Untuk jumlah permintaan SIM (Surat Ijin Mengemudi) mengalami peningkatan sebesar 2,19 persen. Jumlah kecelakaan lalu lintas selama tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 penurunan sebesar 24,19 persen dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 290.600.000,-

4.3.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

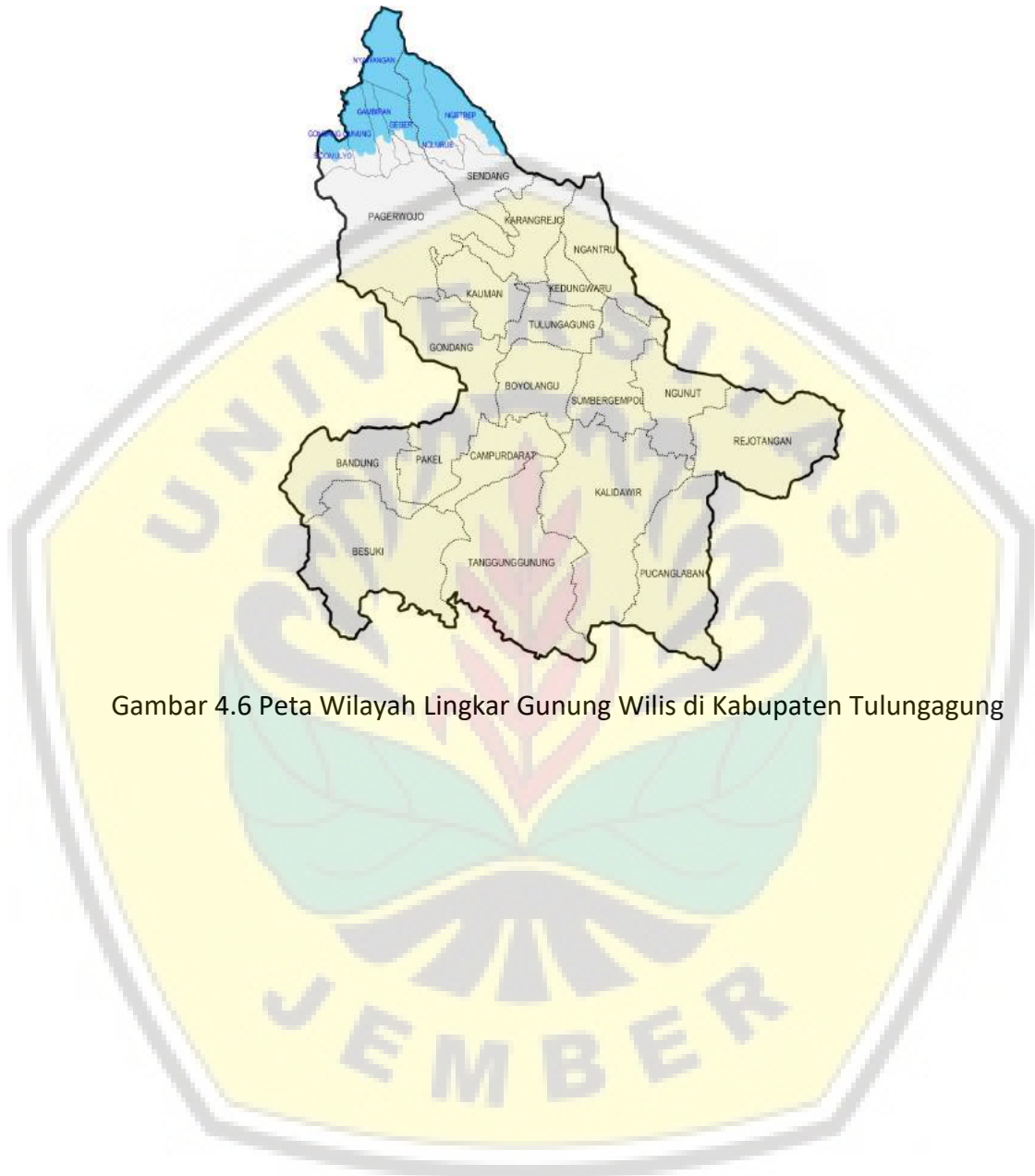
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 10,94 persen yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 25.810.236,01 juta sedangkan tahun 2013 sebesar Rp. 23.264.335,19 juta. Sumbangan terbesar terletak pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diikuti Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi masing-masing 22,43 persen, 20,46 persen dan 19,81 persen.

Sementara angka PDRB Kabupaten Tulungagung Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami kenaikan sebesar 5,45 persen yaitu dari Rp. 20.144.379,54 juta pada tahun 2013 menjadi Rp.21.242.071,93 juta pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen sedangkan pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 6,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2014, terutama didukung oleh pertumbuhan pada Transportasi dan Pergudangan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meskipun memberikan sumbangan sebesar 22,43 persen terhadap total PDRB tetapi pertumbuhannya hanya 3,18 persen.

4.3.8 Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Tulungagung

Bagian wilayah Kabupaten Tulungagung yang termasuk dalam daerah selingkar Gunung Wilis terlihat pada peta berikut:



Gambar 4.6 Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Tulungagung

4.4. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

Gambar 4.7 Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek

4.4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Trenggalek merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur, yang terletak pada $111^{\circ} 24' - 112^{\circ} 11'$ BT dan $7^{\circ} 53' - 8^{\circ} 34'$ LS. Batas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

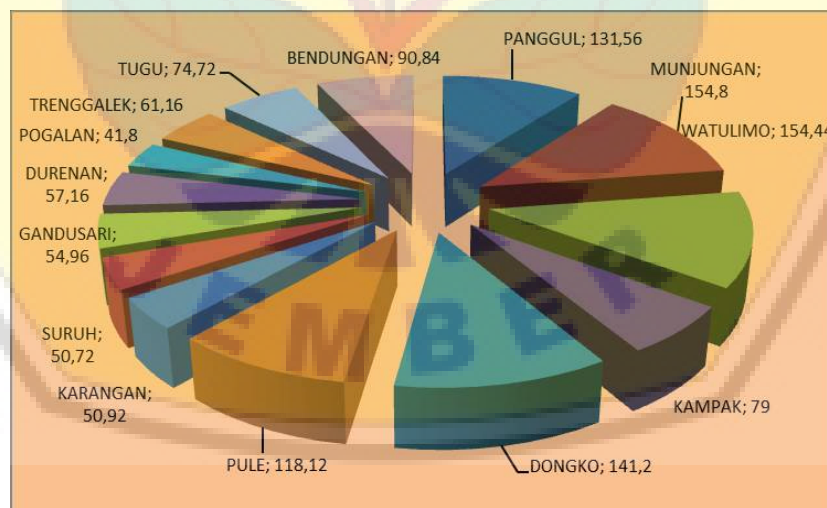
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ponorogo dan Pacitan, dan
- Sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia.

Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Katulistiwa, mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September – April merupakan musim penghujan, dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei–Agustus. Data cuaca dan curah hujan menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau setiap tahunnya.

Berdasarkan susunan eksplorasi tanah, Kabupaten Trenggalek kurang memiliki potensi dalam pengembangan pertanian tanaman pangan. Pada tahun 2014 perusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,64 persen dari luas daerah. Akan lebih menguntungkan bila lebih dikembangkan untuk usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan dan hortikultura. Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Trenggalek, terlihat paling banyak adalah Hutan Negara yaitu 48,31 persen dari wilayah Kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis.

4.4.2 Pemerintahan

Luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 km², secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan. Persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten disajikan pada gambar 4.8 berikut:



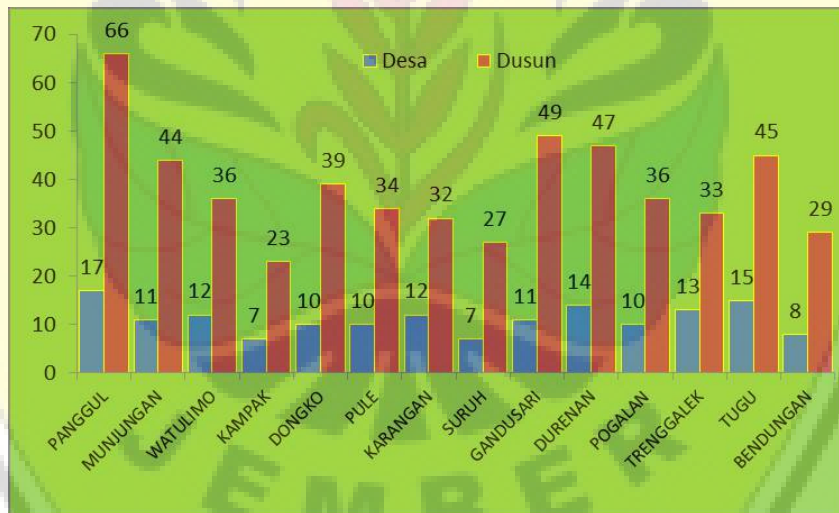
Gambar 4.8 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Unit pemerintahan di bawah Kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa, dari masing-

masing desa terbagi atas dusun/ lingkungan, rukun kampung dan rukun tetangga (RT). Berdasarkan Tingkat Perkembangan Desa, setiap desa dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat, yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada.

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah seluas 126.140 Ha. dibagi habis menjadi 14 kecamatan, 152 desa, 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.290 Rukun Warga (RW) dan 4.502 Rukun Tetangga (RT). Jumlah anggota DPRD Kabupaten Trenggalek hasil Pemilu 2014 sebanyak 45 orang. Partai yang memperoleh kursi terbanyak adalah PDI-P dan PKB yaitu 9 orang. Produk hukum daerah Kabupaten Trenggalek yang telah diterbitkan selama tahun 2014 tercatat; Peraturan Daerah sebanyak 6 buah, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek sebanyak 24 buah dan Keputusan DPRD sebanyak 9 buah.

Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kabupaten Trenggalek Dalam Angka Tahun 2015.

Gambar 4.9 Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Trenggalek

Pejabat Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah :

1. Sekretariat Daerah

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
- b. Asisten Administrasi Umum Setda
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- e. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda
- f. Kepala Bagian Organisasi Setda
- g. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda
- h. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda
- i. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- j. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Setda
- k. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- l. Kepala Bagian Hukum Setda

Sedangkan untuk SKPD (Dinas/ Badan/ Kantor) Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Inspektur
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- d. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- g. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
- h. Kepala Kantor Ketahanan Pangan
- i. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
- j. Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal
- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- l. Kepala Dinas Perkerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan

- m. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- n. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- o. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- p. Kepala Dinas Kesehatan
- q. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
- r. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- s. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
- t. Kepala Dinas Perkerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan
- u. Kepala Dinas Peternakan

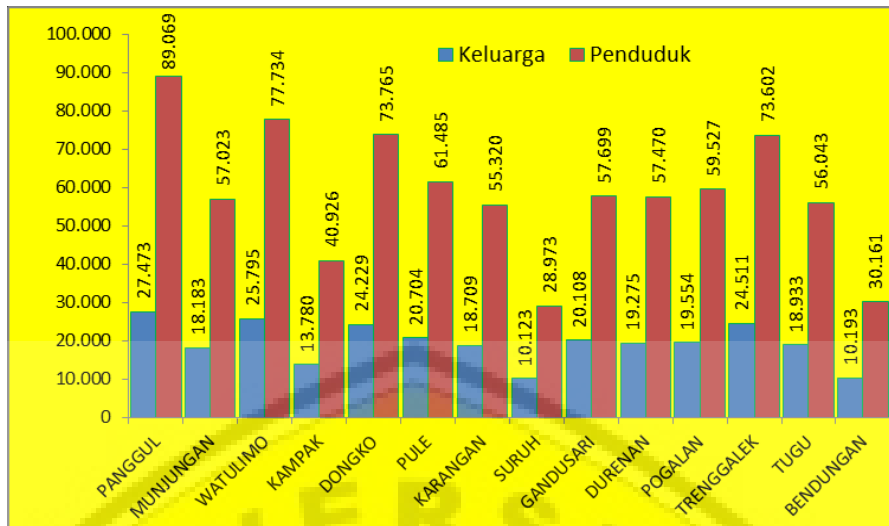
(Sumber : Bagian Pemerintahan Umum/Setda Kabupaten Trenggalek, Tahun 2015)

4.4.3 Penduduk dan Tenaga Kerja

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.261,40 Km² menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2014 sebesar 818.797 jiwa. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 50,34 persen merupakan penduduk laki-laki. Sebaran penduduk pada tahun 2014 menunjukkan bahwa di Kecamatan Panggul berpenduduk terbanyak dengan 89.069 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Suruh yaitu 28.973 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Trenggalek sebesar 649 orang/ Km² dimana Kecamatan Pogalan mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 1.424 jiwa/Km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Bendungan dengan 332 jiwa / Km².

Tahun 2014, jumlah transmigran yang diberangkatkan sebanyak 50 Kepala Keluarga dan 148 jiwa dengan daerah tujuan Kalimantan Utara. Adapun pendidikan para Transmigran yang diberangkatkan, paling banyak adalah tamatan Sekolah Dasar sebesar 81 Jiwa dengan persentase 54,73 persen.

Jumlah penduduk dan keluarga menurut kecamatan di Kabupaten Trenggalek tahun 2015 di tunjukkan pada gambar berikut:



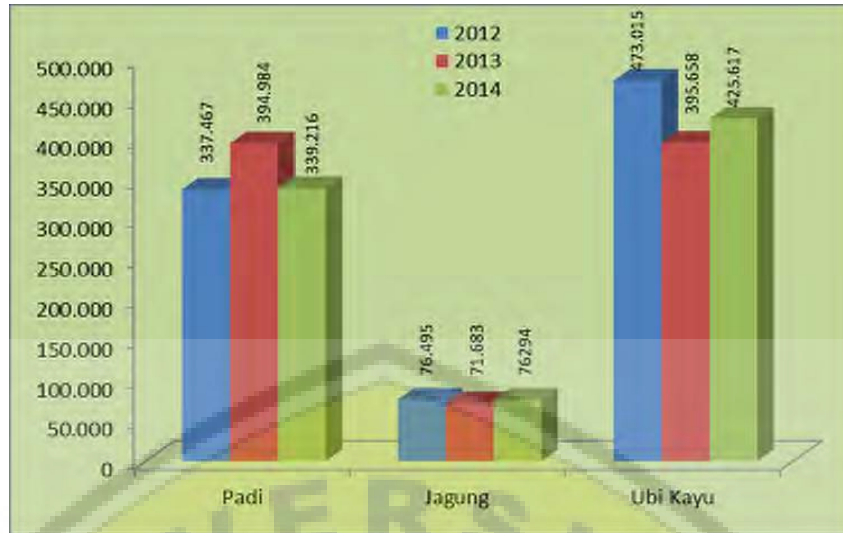
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.10 Jumlah Penduduk dan Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek

4.4.4 Pertanian

Menurut penggunaannya, tanah atau lahan dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu tanah sawah dan tanah non-sawah. Data pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Trenggalek meliputi luas panen, produksi, produktivitas dari tanaman padi, palawija, dan kacang-kacangan. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha pada tahun 2014 memiliki tanah sawah seluas 12.160 Ha atau 9,64 persen dari total luas wilayah. Dari luas sawah tersebut, 18,45 persen dapat ditanami padi 1 kali dalam setahun. Sedangkan 77,18 persen sisanya dapat ditanami padi 2 kali atau lebih dalam setahunnya. Produksi padi sawah tahun 2014 turun 12,38 persen, sedangkan ubi kayu naik 34,97 persen. Selain itu komoditi jagung mengalami kenaikan produksi sebesar 6,4 persen.

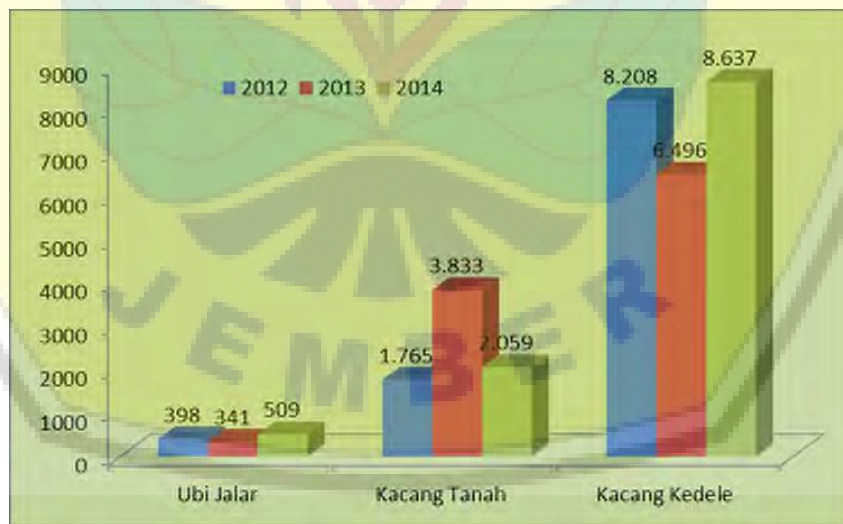
Gambaran produksi padi, jagung dan ubi kayu di Kabupaten Trenggalek antara tahun 2012 – 2014 dalam satuan (ton) adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.11 Produksi Padi, Jagung dan Ubi Kayu di Kabupaten Trenggalek antara Tahun 2012 – 2014 dalam Satuan (Ton)

Sedangkan gambaran produksi ubi jalar, kacang tanah dan kedelai di Kabupaten Trenggalek antara tahun 2012 – 2014 dalam satuan (ton) adalah sebagai berikut:



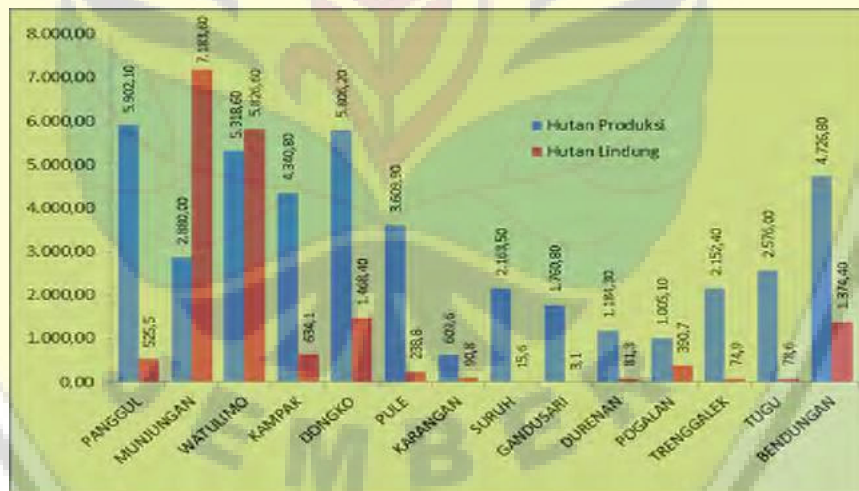
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.12 Produksi Produksi Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kedelai di Kabupaten Trenggalek antara Tahun 2012 – 2014 dalam Satuan (Ton)

Komoditi cabe terjadi fluktuasi produksi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 produksi cabe 4.912 kwintal dan tahun 2014 naik menjadi 8.117 kwintal. Untuk buah-buahan, komoditi terbanyak produksinya adalah pisang dengan produksi 250.473 Kwintal disusul durian dengan produksi 71.944 Kwintal.

Perkebunan, dapat digolongkan ke dalam 2 katagori ; perkebunan rakyat dan perkebunan besar, dimana perkebunan besar terdiri dari perkebunan milik pemerintah dan milik swasta. Data Statistik Kehutanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Perum Perhutani. Luas hutan berdasarkan tata guna hutan digolongkan atas hutan tetap dan hutan yang dikonversikan. Produksi tanaman Perkebunan yang mempunyai kontribusi terbesar adalah produksi kelapa dan cengkeh masing-masing dengan produksi sebesar 13.217,5 ton dan 4.795,75 ton di tahun 2014. Dari total luas Hutan 62.024,50 Ha. Terdapat 17.988,40 Ha Hutan Lindung, dan 44.036,10 Ha Hutan Produksi.

Gambaran luas hutan rakyat menurut kecamatan di Kabupaten Trenggalek tahun 2014 dalam satuan (Ha) adalah sebagai berikut:



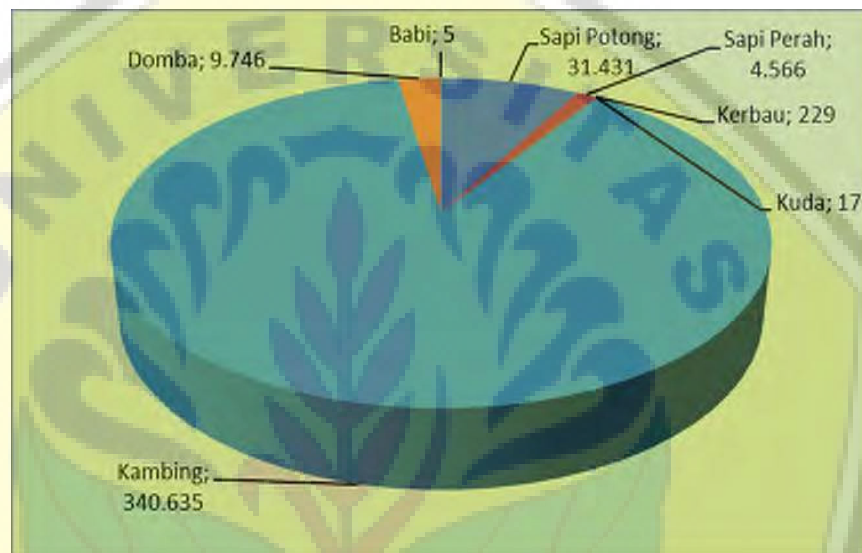
Sumber : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.13 Luas Hutan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 dalam Satuan (Ha)

Data Populasi Ternak bersumber dari Dinas Peternakan, sedangkan data jumlah pemotongan ternak merupakan hasil survei yang dilakukan BPS. Data statistik Perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perikanan. Statistik Perikanan dibedakan atas data perikanan laut dan perikanan

darat. Dilihat dari populasi ternak selama 2014, jumlah ayam ras pedaging menempati urutan pertama untuk ternak yang dibudidayakan masyarakat dengan jumlah 1.864.000 ekor, disusul ayam buras dengan populasi 853.450 ekor, berikutnya kambing, itik dan ayam ras petelur. Sapi perah dengan populasi 4.601 ekor sebagian besar terdapat di Kecamatan Bendungan. Dari sejumlah sapi perah tersebut menghasilkan susu sebanyak 6.387.500 liter selama tahun 2014.

Gambaran populasi ternak besar di Kabupaten Trenggalek tahun 2014 dalam satuan (ekor) adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.14 Populasi Ternak Besar Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Dalam Satuan (Ekor)

Jumlah rumah tangga perikanan tercatat 3.549 rumah tangga terdiri dari 1.185 rumah tangga perikanan laut dan 2.364 rumah tangga perikanan darat. Rumah tangga perikanan laut terdapat pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Watulimo. Untuk Produksi ikan darat tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 17,89 persen dari tahun sebelumnya, dimana produksi ikan lele menempati urutan pertama produksi terbesar yaitu 3.084.287 ton, disusul gurami 112.336 ton diurutan kedua.

4.4.5 Perdagangan

Data perdagangan diperoleh dari hasil pencatatan instansi terkait terutama kantor Dinas Koperindag dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. Jumlah perusahaan wajib daftar usaha baik berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma maupun perseorangan selama tahun 2014 juga turun 49,69 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu pupuk yang disalurkan selama tahun 2014 tercatat 28.864 ton dimana 40,69 persennya pupuk Urea. Adapun gambaran perusahaan di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:



Sumber : Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.15 Perusahaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

Adapun perusahaan perdagangan di Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Perusahaan besar tidak ditemukan di Kabupaten Trenggalek, sedangkan perusahaan menengah sebanyak 41 buah, perusahaan kecil sebanyak 439 buah sehingga total perusahaan perdagangan di Kabupaten Trenggalek sebanyak 470 buah.

4.4.6 Perhubungan

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang sangat penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk memudahkan mobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lainnya. Kelancaran arus perhubungan dapat mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di

wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi prasarana jalan di Kabupaten Trenggalek yang seluruhnya ada 949,93 Km, sebagian dalam kondisi rusak. Panjang jalan yang kondisinya baik tercatat sebanyak 62,84 persen, kondisi sedang 26,37 persen, kondisi rusak ringan 7,72 persen dan rusak berat 3,06 persen. Berikut ini adalah gambaran panjang jalan menurut kondisinya 2010 - 2014 (000 Km):



Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.16 Panjang Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2010 - 2014 (000 Km) di Kabupaten Trenggalek

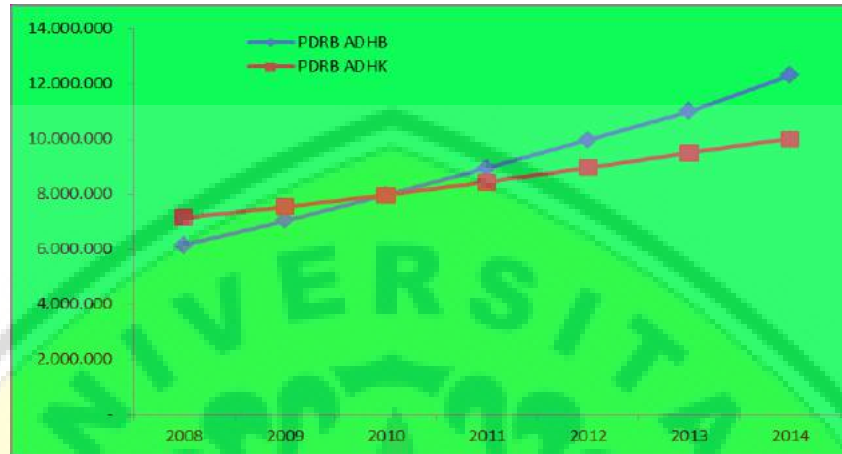
4.4.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tercatat pada tahun 2014, realisasi penerimaan daerah mengalami kenaikan sebesar 291.673 juta rupiah atau 24,17 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan belanja daerah mengalami kenaikan 17,84 persen dari tahun sebelumnya. Dari realisasi penerimaan daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan TK I Jawa Timur di Trenggalek tercatat kenaikan sebesar 20.855.985,561 juta rupiah atau naik 30,17 persen dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 mencapai 5,41 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2014 tercatat 9.995.120,7 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 adalah 12.311.327,7 juta rupiah. PDRB Kabupaten Trenggalek masih didominasi oleh sektor pertanian (31,21%), kemudian disusul oleh sektor perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan

motor (15,23%) kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan (14,00%), sedangkan sektor lainnya kurang dari 10 persen.

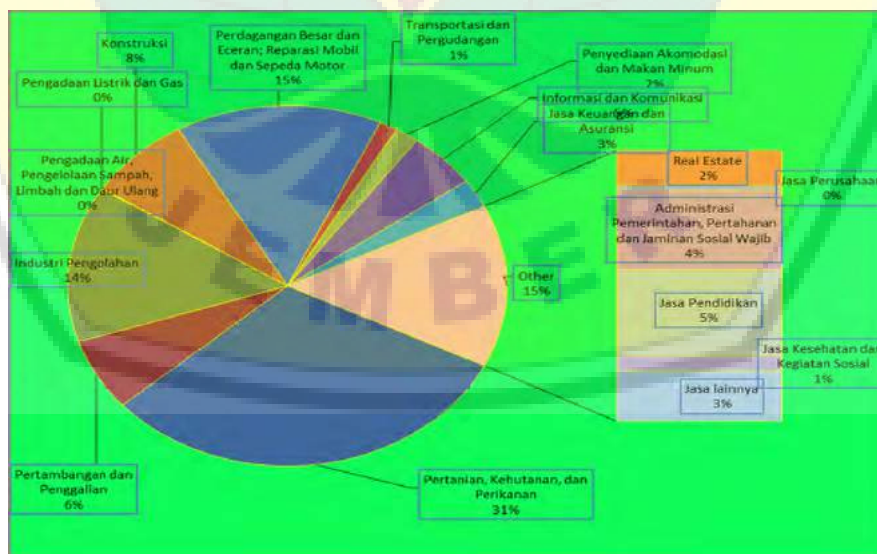
Berikut ini adalah gambaran perkembangan PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2014 (Milyar Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.17 Perkembangan PDRB Kabupaten Trenggalek Tahun 2008-2014 (Milyar Rupiah)

Adapun selain gambaran perkembangan PDRB juga terdapat gambaran mengenai distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2014, sebagai berikut:

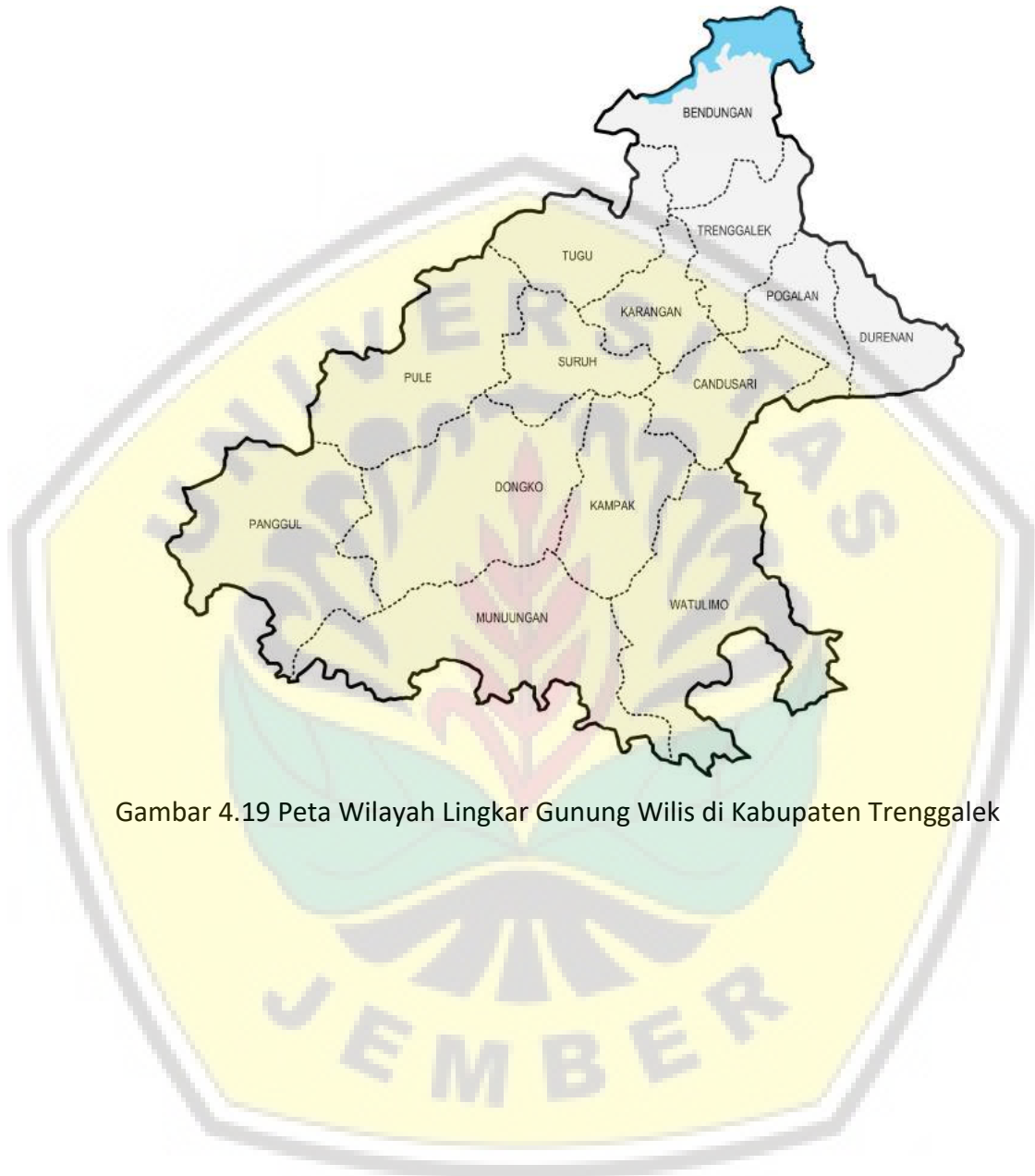


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2015

Gambar 4.18 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014

4.4.8 Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Trenggalek

Bagian wilayah Kabupaten Trenggalek yang termasuk dalam daerah selingkar Gunung Wilis terlihat pada peta berikut:



Gambar 4.19 Peta Wilayah Lingkar Gunung Wilis di Kabupaten Trenggalek

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan kerjasama pembangunan di wilayah Selingkar Gunung Wilis dimaksudkan untuk memaduserasikan program-program pembangunan pemerintah kabupaten-kabupaten yang termasuk di dalamnya yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. Tujuan dasar pembentukan kerjasama ini adalah mengoptimalkan potensi dan sumberdaya secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama antara enam kepala daerah yang diketahui oleh Gubernur Jawa Timur. Kesepakatan ini secara informal sudah terbentuk pada tahun 2011 dan kukuhkan pada tahun 2014. Kesepakatan tersebut diimplementasikan dengan membuat kerjasama bidang-bidang yang diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat pada peningkatan pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

Pembahasan kajian “Kajian Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur” dibagi dalam lima sub bab. Pada tahap awal, pembahasan dimulai dengan menjelaskan kondisi eksisting penataan kawasan. Kondisi eksisting menggambarkan tentang potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten (khususnya yang ada di desa dan kecamatan) yang ada di Kawasan Selingkar Wilis. Pembahasan selanjutnya diarahkan pada pembentukan *grand design* penataan kawasan. *Grand design* ini mengacu pada kondisi eksisting dan proyeksi pada beberapa tahun ke depan (25 tahun) sebagai implementasi rencana pembangunan jangka panjang dan menengah pemerintah kabupaten. Pada sub bab ketiga, pembahasan difokuskan pada sejauh mana implementasi kerjasama hingga saat ini. Tentunya kerjasama ini memiliki hambatan-hambatan di lapangan. Hambatan-hambatan ini dibahas dalam sub bab keempat. Terakhir,

sub bab 5 membahas model kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyusunan grand design tersebut.

5.1 Kondisi Eksisting Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis

Pada bab 4 telah dijelaskan bahwa tiga penyumbang Produk Domestik Bruto terbesar masing-masing Kabupaten adalah sektor pertanian (termasuk di dalamnya sektor pangan, perkebunan, sayuran, buah-buahan), industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sektor-sektor tersebut sangat besar, meskipun potensi sektor lain juga menunjukkan perkembangan. Berikut sumbangan masing-masing sektor di masing-masing kabupaten di selingkar Wilis.

Tabel 5.1 Kontribusi masing-masing sektor pada PDRB di Kabupaten Selingkar Wilis

Sektor	Tulungagung	Trenggalek	Ponorogo	Madiun	Nganjuk	Kediri
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.12	31.21	28.88	32.27	32.19	24.93
Pertambangan & Penggalan	3.86	6.49	2.47	1.08	2.00	1.62
Industri Pengolahan	20.44	14	6.87	9.92	12.97	19.11
Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.03	0.09	0.1	0.05	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.06	0.1	0.17	0.11	0.06
Konstruksi	9.13	7.66	9.23	10.98	9.24	9.6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.38	15.23	17.08	15.76	18.75	20.34
Transportasi dan Pergudangan	2.09	1.33	1.63	1.54	1.40	1.84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.83	1.76	2.84	2.24	1.77	1.28
Informasi dan Komunikasi	6.38	5.08	8.23	7.55	4.94	5.66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.26	2.57	3.07	2.73	2.34	1.8
Real Estate	2.14	1.91	2.62	1.76	1.75	2.07
Jasa Perusahaan	0.37	0.25	0.44	0.33	0.34	0.3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.25	4.29	5.39	5.87	4.94	3.81
Jasa Pendidikan	4.17	4.63	8.12	4.32	3.56	4.81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.10	0.82	0.85	0.87	0.59	0.8
Jasa lainnya	1.35	2.7	2.09	2.51	3.06	1.9
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber:

Kabupaten Tulungagung dalam Angka, 2015

Kabupaten Trenggalek dalam Angka, 2015

Kabupaten Ponorogo dalam Angka, 2015

Kabupaten Mandiri dalam Angka, 2015

Kabupaten Nganjuk dalam Angka, 2015

Kabupaten Kediri dalam Angka, 2015

Jika dilihat dari keterkaitan antar sektor dapat dijelaskan bahwa sektor pengolahan merupakan sektor yang mengolah bahan baku (sektor pertanian) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi seperti industri tembakau, bahan makanan dan minuman. Artinya sektor pengolahan merupakan sektor yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) erat dengan sektor penyedia bahan bakunya (sektor pertanian). Dalam terminology ekonomi kewilayahan dapat dijelaskan bahwa pengelolaan wilayah dapat bersumber dari sumberdaya yang dimilikinya.

Sektor lain yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian adalah sektor perdagangan. Sektor ini dapat bersumber dari sumberdaya lokal maupun luar daerah. Misalnya perdagangan komoditas pertanian, maka barang yang diperdagangkan dapat bersumber dari sumberdaya lokal maupun sumber daya dari luar daerah. Misalnya sumberdaya yang ada di perbatasan Kabupaten Nganjuk dapat diperdagangkan di perbatasan Kabupaten Kediri. Sektor perdagangan juga meliputi perdagangan sepeda motor dan mobil, perdagangan barang-barang hasil olahan.

Pembahasan selanjutnya difokuskan pada wilayah di Selingkar Wilis. Wilayah ini melingkupi kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar Gunung Selingkar Wilis. Kecamatan-kecamatan tersebut digambarkan dalam Tabel 5.2. Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki sumberdaya masing-masing baik sumberdaya pertanian, sumberdaya pariwisata, maupun sumberdaya lainnya. Untuk mendukung sumberdaya tersebut diperlukan sumberdaya lain seperti sarana dan prasana infrastruktur, maupun prasarana kelembagaan.

Dari keenam Kabupaten yang ada di Selingkar Wilis, pembahasan di fokuskan pada empat Kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. Selain itu, kajian juga difokuskan pada kecamatan-kecamatan yang berada di selingkar Gunung Wilis seperti pada tabel berikut. Tahap awal penataan Kawasan Selingkar Wilis difokuskan pada identifikasi sumberdaya alam

dan pengembangan daerah-daerah yang dilewati sarana infrastuktur jalan. Tentu,

Tabel 5.2 Kecamatan-kecamatan di wilayah selingkar Wilis

Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa	Perbatasan dg Kabupaten lain
Tulungagung	Sendang	11	Kediri dan Ponorogo
	Pagerwojo	11	Trenggalek
Trenggalek	Bendungan	11	Tulungagung, Ponorogo
Madiun	Gemarang	7	Nganjuk
	Kare	8	Nganjuk, Ponorogo
	Dagangan	17	Ponorogo
Kediri	Semen	12	Nganjuk
	Mojo	12	Nganjuk
	Banyakan	9	Nganjuk
	Grogol	9	Tulungagung

Sumber:

Kecamatan Sendang dalam Angka, 2015
 Kecamatan Pagerwojo dalam Angka, 2015
 Kecamatan Bendungan dalam Angka, 2015
 Kecamatan Gemarang dalam Angka, 2015
 Kecamatan Kare dalam Angka, 2015
 Kecamatan Dagangan dalam Angka, 2015
 Kecamatan Semen dalam Angka, 2015
 Kecamatan Mojo dalam Angka, 2015
 Kecamatan Banyakan dalam Angka, 2015
 Kecamatan Grogol dalam Angka, 2015

5.1.1 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Sendang, Tulungagung

Kecamatan Sendang terletak di lereng bagian selatan Gunung Wilis, Kabupaten Tulungagung dengan kondisi geografi berbentuk pegunungan. Meskipun demikian petani di Kecamatan Sendang menanam tanaman pangan baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual ke konsumen (komersial). Tanaman yang banyak diusahakan adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Selain itu, tanaman lain yang banyak diusahakan dengan jumlah yang besar adalah tanaman buah-buahan seperti durian, alpukat, mangga. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.3. Potensi lain yang dimiliki adalah potensi sumberdaya peternakan. Sumber data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa terdapat 9.376 ekor sapi potong, dan 6.673 sapi perah.

Tabel 5.3 Potensi Pertanian Kecamatan Sendang, Tulungagung

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon*	Produksi**
Pangan	Padi	4129	22.7
	Jagung	3669	21.8
	Ubi kayu	734	7.5
	Ubi jalar	41	2.7
	Kacang tanah	51	1.8
Sayur-sayuran	Bayam	10	33
	Sawi	16	192
	Kacang panjang	22	119
	Buncis	17	169
	Kangkung	1.5	3
	Cabe rawit	29	135
	Kubis	30	325
	Petai		
	Terong	7	83
	Kentang	-	-
Buah-buahan	Alpoket	8824	378
	Belimbing	2121	63
	Duku/langsat	983	23
	Durian	63125	5732
	Jeruk	1794	132
	Mangga	13100	454
	Manggis	3120	120
	Nangka	4143	420
	Pisang	42312	1077
	Rambutan	13627	439
	Salak	2010	53
	Sawo	7453	129
	Petai	6392	339
	Sirsak	814	47
	Sukun	10596	523
Ternak	Sapi pedaging		9376
	Sapi perah		6673
	Kambing/domba		9231
	Ayam kampung		39975
	Ayam broiler		16300

Sumber:Kecamatan Sendang dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Selain memiliki potensi sumberdaya alam dalam bidang pertanian, Kecamatan Sendang juga memiliki potensi alam berupa tempat wisata antara lain Desa Wisata Sendang, Bendungan Wonorejo, Pemandian Srabah, Pesanggarahan Agrowilis, Candi Penampilan. Selain itu juga terdapat tempat wisata situs peninggalan sejarah yang bernama Situs Mbah Bodho yang terletak di Desa Tugu, yang berjarak 20 km dari pusat kota Tulungagung.

Sementara itu, sarana dan prasarana pendukung yang sudah *terinstal* (ada) di Kecamatan Sendang antara lain 3 pasar tradisional yang terletak di Desa Dono, Desa Nyawangan, dan Desa Sendang dengan akses informasi yang relative mudah. Kondisi ini akan memudahkan aksesibilitas lingkungan bisnis. Namun demikian, kondisi jalan utama (selingkar wilis yang sebagian belum beraspal) dan sempit menyebabkan kurang lancar siklus perdagangan di kecamatan ini.

Tabel 5.4 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Sendang, Tulungagung

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar tradisional	3	
Industri pengolahan	185	
Kondisi jalan agrowilis		sebagian aspal, Lebar 5 meter
Akses informasi		mudah

Sumber: Kecamatan Sendang dalam Angka, 2015
Data dan wawancara dengan Bagian sarana dan Prasarana Kabupaten, 2016

5.1.2 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung

Kecamatan Pagerwojo adalah kecamatan kedua di Kabupaten Tulungagung yang berada di lereng Gunung Wilis. Sama dengan Kecamatan Sendang, kecamatan Pagerwojo memiliki potensi daerah berupa tanaman pangan, buah-buahan, dan peternakan (lihat Tabel 5.5). Durian banyak diusahakan oleh masyarakat yang biasanya dilakukan secara komersial. Jumlah pohon durian dan pisang merupakan populasi terbesar di Kecamatan Pagerwojo. Selain itu kecamatan ini memiliki populasi jumlah ternak sapi potong dan sapi perah yang besar. Di sektor perkebunan, kecamatan ini memiliki populasi kebun cengkah yang lebih luas dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain.

Tabel 5.5 Potensi Pertanian Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	4406	251142
	Jagung	2983	143184
	Ubi kayu	786	78600
	Ubi jalar	24	440
	Kacang tanah	51	765
	Kedelai	300	375
Buah-buahan	Alpokot	2718	-
	Belimbing	283	-
	Duku/langsat	26	-
	Durian	11245	-
	Jambu	428	-
	Jeruk	4370	-
	Sirsak	395	-
	Sukun	98	-
Ternak	Sapi pedaging	-	5424
	Sapi perah	-	9346
	Kerbau	-	95
	Kambing/domba	-	8682
	Kelinci	-	290
	Ayam kampung	-	117024
Perkebunan	Kopi	4001	8.34
	Cengkeh	16800	15.2
	Tebu	72	tidak ada
	Bambu	745	tidak ada
	Jambu mete	70	tidak ada

Sumber:Kecamatan Pagerwojo dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Selain sektor pertanian, Kecamatan Pagerwojo juga memiliki andalan sector Pariwisata antara lain air terjun Laweyan 1 dan air terjun Laweyan 2, Situs Tulungrejo, Makam Srigading, desa wisata Mulyorejo, dan desa wisata Mulyosari. Sektor ini akan memberi nilai tambah bagi warga sekitar utamanya bagi masyarakat yang aktif dalam sector jasa perdagangan.

Dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata Kecamatan Pagerwojo telah memiliki fasilitas-fasilitas penunjang seperti pasar tradisional, akses jalan, dan sarana informasi. Paling tidak terdapat lima pasar tradisional yang dapat digunakan untuk memasarkan produk lokal.

Tabel 5.6 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar tradisional	5	
Industri pengolahan	103	
Kondisi jalan agrowilis		sebagian aspal, Lebar 5 meter
Akses informasi		mudah

Sumber: Kecamatan Pagerwojo dalam Angka, 2015

Data dan wawancara dengan Bagian sarana dan Prasarana Kabupaten, 2016

5.1.3 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek

Tabel 5.7 Potensi Pertanian Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	9014	74
	Jagung	1304	68
	Ubi kayu	1509	406
Sayur-sayuran	Bayam	-	74
	Sawi	-	24
	Kacang panjang	-	74
	Kangkung	-	25
	Cabe rawit	-	66
	Petai	-	199
Buah-buahan	Alpokot	-	467
	Durian	-	298
	Jambu	-	84
	Mangga	-	73
	Nangka	-	138
	Pepaya	-	720
	Pisang	-	2557
	Rambutan	-	187
	Salak	-	807
	Sirsak	-	151
Ternak	Sapi pedaging	-	4601
	Sapi perah	-	4003
	Kerbau	-	27
	Kambing/domba	-	22472
	Ayam kampung	-	49987
	Ayam ras petelur	-	796
Perkebunan	Itik/menthok	-	1309
	Kelapa	599.75	-
	Kopi	74.5	-
	Cengkeh	312.75	-
	Kakao	275	-

Sumber:Kecamatan Pagerwojo dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Kecamatan Bendungan merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang berada di lereng Gunung Wilis. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi, karenanya potensi sector pertanian pangan utama adalah ubi kayu. Meskipun populasi tanaman tahunan di kecamatan ini tidak sebesar di Kecamatan Pagerwojo, namun demikian kecamatan ini memiliki populasi tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, dan kopi. Secara detail populasi sector pertanian di Kecamatan Bendungan ditampilkan dalam tabel 5.7

Potensi pariwisata di Kabupaten Trenggalek berada di Kecamatan Watulima, Munjungan, Panggul dan Kecamatan Durenan. Namun demikian akses untuk menunjunya dapat dicapai baik dengan jalur lintas selatan maupun jalur lingkaran wilis (terutama yang ada di Kecamatan Durenan).

Untuk mendukung sector pertanian dan sector lainnya, diperlukan sarana pendukung antara lain ketersediaan pasar, industri pengolahan, sarana prasarana jalan. Terdapat 1 kios KUD, dan 4 kios non KUD di kecamatan ini yang dapat digunakan untuk mendapatkan input maupun menjual hasil output. Selain itu terdapat 1347 industri pengolahan dengan kategori permanen (L2). Berikut secara detail fasilitas penunjang yang ada di Kecamatan Bendungan.

Tabel 5.8 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Bendungan, Trenggalek

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	3	
Lembaga keuangan (termasuk KUD)	1	
Kios non KUD	4	
Industri pengolahan kategori permanen (L2)	1347	
Kondisi jalan agrowilis		sebagian aspal, Lebar 4 meter
Akses informasi		mudah

Sumber: Kecamatan Bendungan dalam Angka, 2015
 Data dan wawancara dengan Bagian sarana dan Prasarana Kabupaten, 2016

5.1.4 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Gemarang, Madiun

Potensi pertanian di Kecamatan Gemarang sangat besar sekali baik sektor pangan, buah-buahan dan peternakan. Sektor pangan didominasi oleh sektor padi, sedangkan sektor buah didominasi oleh buah alpukat dan jambu biji. Di

sektor peternakan, jumlah ternak sapi merupakan peternakan utama di Kecamatan Gemarang.

Tabel 5.9 Potensi Pertanian Kecamatan Gemarang, Madiun

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	2377	15688
	Jagung	557	4066
	Ubi kayu	873	13618
	Ubi jalar	1	7.69
	Kacang tanah	47	78
	Kedelai	266	425.6
	Kacang hijau	50	63.5
Sayur-sayuran	Cabe	-	57
	Tomat	-	17.65
	Bayam	-	22
	Kacang panjang	-	276.8
	Terong	-	60
Buah-buahan	Alpokot	13530	1082
	Belimbing	2687	553
	Durian	1000	12
	Jambu	10498	4095
	Jeruk	711	35.55
	Mangga	37750	1500
	Manggis	945	37.8
	Nangka	5442	435
	Pepaya	6036	301
	Pisang	2500	47.5
	Rambutan	4123	206
	Petai	2000	100
	Sirsak	8158	163
Sukun	2700	108	
Ternak	Sapi pedaging	-	2065
	Kerbau	-	39
	Kambing/domba	-	20407
	Ayam kampung	-	28708
	Ayam broiler	-	2000

Sumber:Kecamatan Gemarang dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Untuk mendukung kelangsungan usaha tani maupun usaha perdagangan terdapat sarana dan prasarana di Kecamatan Gemarang yaitu pasar desa, lembaga keuangan, dan industri pengolahan. Industri pengolahan banyak memanfaatkan sumberdaya lokal seperti industry pengolahan makanan, industry kerajinan dan lainnya.

Tabel 5.10 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Gemarang, Madiun

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	2	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	14	
Koperasi (KUD dan non-KUD)	12	
Industri pengolahan	78	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian beraspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Gemarang dalam Angka, 2015

5.1.5 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Kare, Madiun

Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berada di lereng Gunung Wilis. Sama dengan kecamatan lainnya, Kecamatan Kare juga memiliki potensi sector pertanian yang luar biasa. Hal ini Nampak dari luas lahan yang digunakan dan produksi yang dihasilkan untuk mengusahakan tanaman pangan, sayur-sayuran, perkebunan dan lainnya. Potensi selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 5.11. Selain sektor pertanian, kecamatan Kare juga menyimpan banyak lokasi wisata yang sangat menarik antara lain Gunung Wilis, air terjun Seweru, air terjun Krecekan Denu, air terjun Banyulawe Dong. Lokasi wisata tersebut sebagian besar lokasi wisata alami yang menawarkan keindahan alam dan kesejukan udara.

Untuk menunjang potensi sumberdaya yang dimiliki, Kecamatan Kare sudah banyak memiliki fasilitas baik yang dibangun pemerintah maupun yang didirikan oleh pengusaha swasta. Fasilitas yang dibangun pemerintah misalnya pasar, koperasi unit desa. Sedangkan usaha yang dibangun swasta antara lain koperasi dan industry pengolahan yang memanfaatkan sumberdaya local. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 5.12

Tabel 5.11 Potensi Pertanian Kecamatan Kare, Madiun

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	2817	18873
	Jagung	813	6422
	Ubi kayu	525	8190

Sayur-sayuran	Bawang merah	-	16
	Cabe	-	34.1
	Tomat	-	64.3
	Terong	-	125.6
Buah-buahan	Alpoket	-	208
	Belimbing	-	64
	Duku/langsat	-	13.94
	Durian	-	25
	Jeruk	-	8.4
	Mangga	-	72
	Manggis	-	25
	Nangka	-	19.8
	Pepaya	-	121
	Pisang	-	1540
	Rambutan	-	30
	Petai	-	28.9
	Sukun	-	4.52
Ternak	Sapi pedaging	-	2990
	Sapi perah	-	4
	Kerbau	-	14
	Kambing/domba	-	13548
	Ayam kampung	-	32482
	Ayam broiler	-	540000
	Itik/menthok	-	1026
Perkebunan	Kelapa	325 265	-
	Kopi	1148 381	-
	Cengkeh	4211 609	-
	Kapuk randu	16 247	-
	Kakao	2421 448	-
	Kakao	2421 448	-

Sumber:Kecamatan Kare dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Tabel 5.12 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Kare, Madiun

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	3	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	14	
Koperasi (KUD dan non-KUD)	19	
Industri pengolahan	157	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian diaspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Kare dalam Angka, 2015

5.1.6 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Dagangan, Madiun

Kecamatan Dagangan merupakan Kecamatan di Kabupaten Madiun yang terletak di lereng Gunung Wilis yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Di Sektor pertanian, khususnya sektor pangan, sebagian besar lahan digunakan untuk tanaman padi, meskipun pengusahaannya menggunakan lahan non teknis.

Tabel 5.13 Potensi Pertanian Kecamatan Dagangan, Madiun

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	5380	34930
	Jagung	201	1309
	Ubi kayu	418	6472
	Kedelai	152	259
	Kacang hijau	212	230
Sayur-sayuran	Cabe	-	178
Buah-buahan	Alpoket	-	12.96
	Belimbing	-	6.93
	Duku/langsat	-	3.94
	Durian	-	591
	Jambu	-	4.98
	Jeruk	-	9.17
	Mangga	-	854
	Nangka	-	668
	Pepaya	-	1099
	Pisang	-	279
	Rambutan	-	1032
	Sawo	-	3.68
	Petai	-	34.8
	Sirsak	-	53.4
Sukun	-	2.66	
Ternak	Sapi pedaging	-	1213
	Kerbau	-	211
	Kambing/domba	-	3653
	Ayam kampung	-	31313
	Ayam ras petelur	-	1000
	Ayam broiler	-	23000

Sumber:Kecamatan Dagangan dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Kecamatan Dagangan juga memiliki lokasi wisata yang masih alami yaitu lokasi wisata air terjun Kucur yang berada di Desa Padas. Lokasi wisata ini relative baru dikenal di kalangan masyarakat.

Kecamatan ini sudah memiliki fasilitas penunjang baik untuk penunjang usaha maupun pariwisata. Jumlah pasar sebanyak tujuh buah dapat dimanfaatkan untuk transaksi hasil bumi. Selain itu terdapat fasilitas keuangan seperti perbankan dan koperasi.

Tabel 5.14 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Dagangan, Madiun

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa (termasuk pasar pemerintah)	7	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	30	
Koperasi (KUD dan non-KUD)	45	
Industri pengolahan	332	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian diaspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Dagangan dalam Angka, 2015

5.1.7 Potensi Sektor dan sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Semen, Kediri

Tabel 5.15 Potensi Pertanian Kecamatan Semen, Kediri

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi (ton)
Pangan	Padi	2100	11999
	Jagung	1337	7314
	Ubi kayu	655	7980
	Kacang tanah	1914	3860
Sayur-sayuran	Bawang merah	3	9
	Cabe	18	56
	Tomat	11	88
	Terong	1	6
Buah-buahan	Alpoket		23532
	Belimbing		400
	Duku/langsat		150
	Durian		3000
	Jambu		183
	Mangga		193824
	Nangka		800
	Pisang		7525
	Rambutan		13057
	Sawo		310
Sirsak		210	
Sukun		226	
Ternak	Sapi pedaging		7420
	Kambing/domba		7666
	Ayam kampung		47046
	Ayam ras petelur		68547
	Itik/menthok		7065

Perkebunan	Kelapa	111	98
	Kopi	12	4
	Cengkeh	32	12
	Kapuk randu	13	4
	Tebu	201	1133
	Kakao	4	2

Sumber:Kecamatan Semen dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Kecamatan Semen memiliki potensi sektor pertanian dan pariwisata. Kediri Waterpark

Tabel 5.16 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Semen, Kediri

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	2	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	4	
Industri pengolahan	27	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian diaspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Semen dalam Angka, 2015

5.1.8 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Mojo, Kediri

Tabel 5.17 Potensi Pertanian Kecamatan Mojo, Kediri

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	2,590	16,073
	Jagung	2,136	22,879
	Ubi kayu	1,858	37,821
	Ubi jalar	3	42
	Kacang tanah	203	110
	Kedelai	134	49
	Kacang hijau	59	59
	Sayur-sayuran	Cabe	22
Tomat		5	75
Kacang panjang		12	18
Buah-buahan	Alpoket	31,146	310
	Belimbing	734	8
	Durian	19656	15
	Jambu	350	1
	Jeruk	3,615	14
	Nangka	761	7
	Pisang	14203	170
	Rambutan	26,150	76

	Salak	1000	4
	Sawo	250	4
	Sirsak	187	2
	Sukun	2023	6
Ternak	Sapi pedaging		9929
	Kerbau		11
	Kambing/domba		12278
	Ayam kampung		67078
	Ayam broiler		275400
	Itik/menthok		11740
Perkebunan	Kelapa	302	278
	Kopi	30	14
	Cengkeh	143	43
	Kapuk randu	6	1.5
	Tebu	1230	4053
	Bambu	2	1
	Jambu mete	9	7

Sumber:Kecamatan Mojo dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Selain potensi pertanian, Kecamatan Mojo memiliki potensi lain di sektor pariwisata. Sektor pariwisata andalan di Kecamatan Mojo adalah air terjun Dolo dan air terjun Irenggolo. Tempat wisata ini masih alami dan berada di kawasan dengan udara sejuk. Sektor ekonomi di Kecamatan ini ditunjang dengan fasilitas umum seperti delapan pasar tradisional, dua lembaga keuangan dan lainnnya.

Tabel 5.18 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Mojo, Kediri

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	8	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	2	
Koperasi (KUD dan non-KUD)	20	
Industri pengolahan	260	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian diaspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Mojo dalam Angka, 2015

5.1.9 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Banyakan, Kediri

Tabel 5.19 Potensi Pertanian Kecamatan Banyakan, Kediri

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	1894	107.048
	Jagung	2251	125.965
	Ubi kayu	500	98.84
	Kacang tanah	266	3513
	Kedelai	5	60
Sayur-sayuran	Cabe	9	726
	Kacang panjang	1	85
	Kangkung	7	800
	Terong	1	256
Buah-buahan	Alpoket	3.728	25
	Durian	4768	465
	Mangga	162150	92500
	Nangka	4215	840
	Pisang	5820	490
	Rambutan	6941	400
	Sawo	825	225
Ternak	Sapi pedaging		2724
	Kerbau		9
	Kambing/domba		6937
	Ayam kampung		23642
	Ayam broiler		41900
	Itik/menthok		1533

Sumber: Kecamatan Banyakan dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Potensi pertanian yang dimiliki Kecamatan Banyakan adalah pangan, buah-buahan, dan ternak. Selain itu fasilitas pendukung yang dimiliki adalah dua pasar, empat lembaga keuangan dan koperasi. Koperasi ini sangat bermanfaat untuk pengembangan sektor baik untuk penyediaan input maupun penjualan output.

Tabel 5.20 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Banyakan, Kediri

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	2	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	4	
Koperasi (KUD dan non-KUD)	1	
Industri pengolahan	399	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian diaspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Banyakan dalam Angka, 2015

5.1.10 Potensi Sektor dan Sarana-prasarana pendukung di Kecamatan Grogol,
Kediri

Tabel 5.21 Potensi Pertanian Kecamatan Grogol, Kediri

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	2340	15050
	Jagung	1948	12280.5
	Ubi kayu	375	7944.45
	Kacang tanah	91	313.2
Sayur-sayuran	Bawang merah	6	171
	Kacang panjang	7	28
Buah-buahan	Mangga	189885	22528.65
	Nangka	4750	1260
	Pisang	79006	924
Ternak	Sapi pedaging		4384
	Kambing/domba		3517
	Ayam kampung		17524
	Ayam broiler		40000
	Itik/menthok		540
Perkebunan	Kelapa	193	22.2
	Kopi	15	9.75
	Cengkeh	39	29.25
	Tebu	148	1 038.59
	Kakao	19	1.7

Sumber: Kecamatan Grogol dalam Angka, 2015

Keterangan:

* Satuan luas lahan untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah hektar, ukuran skala untuk tanaman buah-buahan adalah jumlah pohon.

** Satuan produksi untuk tanaman pangan dan sayur-sayuran adalah kwintal.

Tabel 5.21 Sarana dan prasarana Pendukung di Kecamatan Grogol, Kediri

Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Pasar desa	1	
Lembaga keuangan (termasuk BPR dan koperasi simpan pinjam)	4	
Koperasi (KUD dan non-KUD)	-	
Industri pengolahan	39	
Kondisi jalan agrowilis		Sebagian diaspal
Akses informasi		Mudah

Sumber: Kecamatan Grogol dalam Angka, 2015

Berdasarkan penggambaran masing-masing kecamatan dapat disimpulkan bahwa kawasan selingkar wilis memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Paling tidak terdapat 66.280 hektar lahan yang digunakan untuk memproduksi tanaman pangan dengan potensi sebesar 606.892 ton. Luas

lahan ini sedikit lebih luas dibandingkan dengan lahan yang ditanami padi di Kabupaten Kediri (51.278ha). Selain itu, kecamatan-kecamatan di Selingkar Wilis juga memiliki potensi untuk ditanami sayur. Paling tidak terdapat 300 hektar lahan yang ditanami dengan sayur-sayuran. Luas lahan ini termasuk sempit jika dibandingkan dengan luas lahan yang ditanami sayur untuk satu Kabupaten. Namun demikian, paling tidak dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pendapatan petani.

Khusus untuk sektor peternakan, jumlah ternak sapi di wilayah selingkar Wilis sebanyak 50.126 ekor untuk sapi potong dan 20.026 untuk sapi perah. Jumlah ini hanya $\frac{1}{4}$ dari total populasi di ternak sapi potong di Kabupaten Kediri 192.631 ekor, akan tetapi jumlah sapi perahnya dua kali lipat dibandingkan dengan Kabupaten Kediri. Secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22 Total luas lahan untuk tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, ternak dan perkebunan di wilayah Selingkar Wilis

Sektor	Subsektor	Luas areal / jumlah pohon	Produksi
Pangan	Padi	37,047	245,132
	Jagung	17,199	109,785
	Ubi kayu	8,233	236,825
	Kacang tanah	2,623	10,439
	Kedelai	857	1,169
	Kacang hijau	321	353
	Sub total	66.280	6.068,92
	Sayur-sayuran	Daun bawang	8
Cabe		99	1,427
Tomat		25	336
Bayam		10	129
Sawi		16	216
Kacang panjang		42	601
Buncis		17	169
Kangkung		9	828
Cabe rawit		29	201
Kubis		30	325
Petai		0	199
Terong		9	531
Subtotal		293.5	5061.45
Buah-buahan	Alpoket	56,222	26,015
	Belimbing	5,825	-
	Duku/langsat	1,009	-
	Durian	99,794	10,138
	Jeruk	10,490	199
	Mangga	403,746	311,806
	Manggis	6,935	183
	Nangka	22,061	4,588
	Pisang	165,138	14,610
	Rambutan	52,600	15,427

	Salak	3,010	864
	Sawo	8,658	672
	Petai	8,392	503
	Sirsak	9,554	626
	Sukun	15,417	870
	Subtotal	868850.73	386499.79
Ternak	Sapi pedaging	-	50,126
	Sapi perah	-	20,026
	Kerbau	-	407
	Kambing/domba	-	108,391
	Kelinci	-	290
	Ayam kampung	-	454,779
	Ayam ras petelur	-	70,343
	Ayam broiler	-	938,600
	Itik/menthok	-	23,213
		Subtotal	-
Perkebunan	Kopi	-	36
	Cengkeh	-	99
	Kapuk randu	-	6
	Jambu mete	-	8
	Subtotal	-	154

Sumber: Ringkasan tabel 5.3 – 5.22

Selanjutnya, sektor pariwisata di Kawasan Selingkar Wilis memiliki karakter berupa wisata alam seperti air terjun, gua, candi, dan lainnya. Paling tidak terdapat 20 lokasi wisata yang membentang di Kawasan Selingkar Wilis dari Kecamatan Sendang di Tulung Agung, hingga kecamatan Grogol di Kabupaten Kediri. Berikut detail nama-nama lokasi wisata di daerah selingkar Wilis.

Tabel 5.22 Obyek wisata yang ada di Wilayah Selingkar Wilis.

Kecamatan	Nama obyek wisata	Jumlah	Jenis wisata
Kecamatan Sendang	Desa Wisata Sendang, Bendungan Wonorejo, Pemandian Srabah, Pesanggarahan Agrowilis, Candi Penampilan, Situs Mbah Bodho	6	Wisata alam Wisata sejarah Wisata budaya
Kecamatan Pagerwojo	Air terjun Laweyan 1 Air terjun Laweyan 2, Situs Tulungrejo, Makam Srigading, Desa wisata Mulyorejo, Desa wisata Mulyosari	6	Wisata alam Wisata sejarah Wisata budaya

Kecamatan Kare	Gunung Wilis, Air terjun Seweru, Air terjun Krecekan Denu, Air terjun Banyulawe Dong	4	Wisata alam
Kecamatan Dagangan	Air terjun Kukur	1	Wisata alam
Kecamatan Semen	Kediri Water Park	1	Wisata alam dan buatan
Kecamatan Mojo	air terjun Dolo air terjun Irenggolo	2	Wisata alam

Sumber: Sekertariat Bersama Kerjasama Selingkar Wilis, 2016.

5.2 *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis

Grand Design kawasan Selingkar Wilis merupakan desain utama kawasan tersebut pada masa yang akan datang (baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang). *Grand design* ini didasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan di selingkar wilis. Secara sederhana dapat diketahui bahwa kecamatan yang memiliki sumberdaya yang besar (baik luas lahan maupun jumlah produksi) merupakan kecamatan yang memiliki potensi yang besar. Asumsi tersebut didasarkan pada konsep efisiensi dalam penggunaan sumberdaya baik sumberdaya input maupun sumberdaya output. Artinya jika asumsi pengelolaan sumberdaya dikelola oleh tenaga kerja lokal, maka tingginya produksi di wilayah (kecamatan) tertentu merupakan cerminan bahwa penggunaan tenaga kerja juga tinggi. Selain itu, jika produksi suatu komoditas di kecamatan tertentu tinggi, maka akan efisien untuk mengolah lebih lanjut di lokasi tersebut.

Namun dalam konsepsi wilayah terdapat pendekatan keunggulan wilayah yang banyak digunakan, yaitu konsep *location Quotion* (LQ). Pada intinya konsep ini memperbandingkan komoditas tertentu di wilayah tertentu dengan total komoditas di wilayah rujukan. Dalam penelitian ini Wilayah rujukan bukan merupakan wilayah masing-masing kabupaten, akan tetapi wilayah Selingkar Wilis. Misalkan komoditas pangan di Kecamatan Kare, Madiun

dibandingkan dengan komoditas pangan di total kecamatan wilayah Selingkar Wilis. Hal ini akan menggambarkan bahwa komoditas padi akan menjadi sektor basis (nilai $LQ > 1$) pada lokasi selingkar Wilis, yang bisa jadi bukan sektor basis pada kabupaten masing-masing. Karena keterbatasan data yang tersedia, penentuan sektor basis didasarkan pada luas lahan (sektor pangan), produksi (sektor sayuran dan perkebunan), jumlah pohon (sektor buah), jumlah ekor (untuk peternakan). Dalam penelitian ini total wilayah di Selingkar Wilis terbatas sebanyak 10 kecamatan, seperti yang terdapat dalam Tabel 5.2. Pengelompokan ini lebih bersifat penggambaran secara makro dibandingkan kondisi riil yang jumlahnya lebih dari 10 kecamatan.

Secara makro terdapat 5 sektor utama di Sektor Pertanian, yaitu sektor pangan, subsector sayuran, subsector buah-buahan, subsector peternakan, dan subsector perkebunan. Subsector pangan terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Berikut hasil analisis LQ pada masing-masing kecamatan di Selingkar Wilis.

Tabel 5.23 Hasil analisis LQ sektor tanaman pangan di kecamatan selingkar Wilis

Subsektor	Sendang	Pagerwojo	Bendungan	Gemarang	Kare	Dagangan	Semen	Mojo	Banyakan	Grogol
Padi	0.86	0.92	1.36	1.02	1.21	1.51	0.63	0.66	0.69	0.88
Jagung	1.64	1.34	0.42	0.51	0.75	0.12	0.86	1.18	1.76	1.58
Ubi kayu	0.69	0.74	1.03	1.68	1.02	0.53	0.88	2.14	0.82	0.64
Kacang tanah	0.15	0.15	0.00	0.28	0.00	0.00	8.05	0.73	1.37	0.48
Kedelai	0.00	2.71	0.00	4.93	0.00	1.85	0.00	1.48	0.08	0.00
Kacang hijau	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	6.88	0.00	1.74	0.00	0.00

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis yang terangkum dalam Tabel 5.23 diketahui bahwa sektor padi unggul di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Bendungan, Gemarang, Kare, dan Dagangan. Hasil analisis LQ ini sangat bermanfaat dalam penentuan strategi pengembangan komoditas dalam lingkup wilayah. Misalnya, pengembangan fasilitas bersama untuk pengolahan padi menjadi beras, dan juga fasilitas bersama untuk membangun fasilitas resi gudang. Fasilitas bersama juga dapat dibentuk untuk komoditas-komoditas lain seperti jagung, kedelai, kacang hijau, dan lain-lain.

Tabel 5.24 Hasil analisis LQ sektor tanaman sayuran di kecamatan selingkar Wilis

Subsektor	Sendang	Pagerwojo	Bendungan	Gemarang	Kare	Dagangan	Semen	Mojo	Banyakan	Grogol
Daun bawang	3.46	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cabe	0.51	-	0.00	0.47	0.50	3.55	1.25	2.27	1.38	0.00
Tomat	0.94	-	0.00	0.61	4.04	0.00	8.34	4.38	0.00	0.00
Bayam	0.89	-	6.28	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sawi	3.08	-	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kacang panjang	0.69	-	1.35	5.38	0.00	0.00	0.00	0.59	0.38	1.19
Buncis	3.46	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kangkung	0.01	-	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00
Cabe rawit	2.33	-	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kubis	3.46	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Petai	0.00	-	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Terong	0.54	-	0.00	1.32	4.99	0.00	0.36	0.00	1.31	0.00

Sumber: Data diolah, 2016

Keterangan: - : data tidak tersedia

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa tanaman sayuran unggul di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulung Agung, dan Kecamatan Bendungan Trenggalek. Hal ini karena kecamatan-kecamatan tersebut memiliki beberapa sayuran yang lebih unggul dibandingkan kecamatan lainnya (lihat kolom Kecamatan Sendang dan Kolom Kecamatan Bendungan Tabel 5.24).

Selanjutnya, tanaman buah banyak ditanam masyarakat di pekarangan rumah meskipun ada beberapa yang membudidayakannya di hamparan secara terbatas di Tegalan. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa komoditas Alpokat unggul di Kecamatan Bendungan, Gemarang, Kare, dan Mojo; sedangkan komoditas durian unggul di Kecamatan Sendang dan Kecamatan dagangan (lihat Tabel 5.25).

Tabel 5.25 Hasil analisis LQ sektor tanaman buah di kecamatan selingkar Wilis

Subsektor	Sendang	Pagerwojo	Bendungan	Gemarang	Kare	Dagangan	Semen	Mojo	Banyakan	Grogol
Alpokat	0.57	-	1.27	1.85	1.43	0.04	0.67	7.46	0.00	0.00
Belimbing	0.09	-	-	0.95	0.44	0.02	0.01	0.19	0.00	0.00
Duku/langsat	0.03	-	-	0.00	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Durian	8.58	-	0.81	0.02	0.17	1.89	0.08	0.36	0.03	0.00
Jambu	-	-	0.23	7.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00
Jeruk	0.20	-	0.00	0.06	0.06	0.03	0.00	0.34	0.00	0.00
Mangga	0.68	-	0.20	2.57	0.49	2.73	5.48	0.00	6.70	13.54

Manggis	0.18	-	0.00	0.06	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nangka	0.63	-	0.37	0.74	0.14	2.13	0.02	0.17	0.06	0.76
Pepaya	-	-	1.95	0.52	0.83	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
Pisang	1.61	-	6.93	0.08	10.56	0.89	0.21	4.09	0.04	0.56
Rambutan	0.66	-	0.51	0.35	0.21	3.29	0.37	1.83	0.03	0.00
Salak	0.08	-	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
Sawo	0.19	-	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.10	0.02	0.00
Petai	0.51	-	0.00	0.17	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Sirsak	0.07	-	0.41	0.28	0.00	0.17	0.01	0.05	0.00	0.00
Sukun	0.78	-	0.00	0.18	0.03	0.01	0.01	0.14	0.00	0.00

Sumber: Data diolah, 2016

Keterangan: - : data tidak tersedia

Peternakan sapi pedaging (sapi potong) banyak unggul di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Bendungan, Gemarang, Semen, Banyakan, dan Grogol. Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi untuk pengembangan peternakan ini. Selain itu terdapat peternakan sapi perah yang juga unggul di beberapa kecamatan (lihat Tabel 5.26).

Tabel 5.26 Hasil analisis LQ sektor peternakan di kecamatan selingkar Wilis

Subsektor	Sendang	Pagerwojo	Bendungan	Gemarang	Karogen	Dagangan	Semen	Mojong	Banyakan	Grogol
Sapi pedaging	3.82	1.28	1.84	1.29	-	0.67	1.79	0.88	1.18	2.21
Sapi perah	6.81	5.52	4.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kerbau	0.00	2.76	1.33	3.00	-	14.30	0.03	0.12	0.48	0.00
Kambing/domba	1.74	0.95	4.15	5.89	-	0.93	0.86	0.50	1.39	0.82
Kelinci	0.00	11.83	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayam kampung	1.80	3.04	2.20	1.98	-	1.90	1.25	0.65	1.13	0.97
Ayam ras petelur	0.00	0.00	0.23	0.00	-	0.39	11.79	0.00	0.00	0.00
Ayam broiler	0.35	0.00	0.00	0.07	-	0.68	0.00	1.30	0.97	1.08
Itik/menthok	0.00	0.00	1.13	0.00	-	0.00	3.68	2.24	1.43	0.59

Sumber: Data diolah, 2016

Keterangan: - : data tidak tersedia

Beberapa komoditas yang merupakan basis antara lain komoditas kopi dan cengkeh di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Grogol. Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut memiliki potensi yang

lebih dalam pengembangan komoditas-komoditas tersebut dibandingkan kecamatan lainnya (lihat Tabel 5.27).

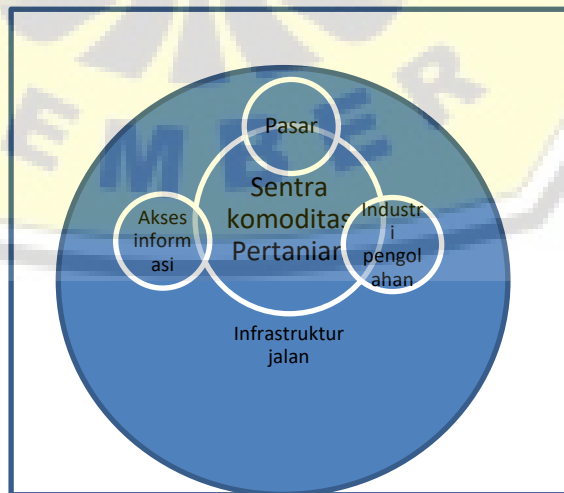
Tabel 5.27 Hasil analisis LQ sektor tanaman perkebunan di kecamatan selingkar Wilis

Subsektor	Sendang	Pagerwoj	Bendungan	Gemarang	Karegen	Dagangan	Semenung	Mojong	Banyak	Grogol
Kopi	-	1.51	-	-	-	-	0.01	0.01	-	1.02
Cengkeh	-	1.00	-	-	-	-	0.02	0.02	-	1.11
Kapuk randu	-	0.00	-	-	-	-	0.10	0.01	-	0.00
Bambu	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.04	-	0.00
Jambu mete	-	0.00	-	-	-	-	0.02	0.03	-	0.00
Kakao	-	0.00	-	-	-	-	0.07	0.00	-	1.74

Sumber: Data diolah, 2016

Keterangan: - : data tidak tersedia

Berdasarkan Tabel 5.23 hingga tabel 5.27 disimpulkan bahwa masing-masing kecamatan memiliki keunggulan masing-masing sektor. Namun demikian perlu adanya formulasi (*design*) untuk mengembangkan sektor tersebut. Formulasi ini dibuat dengan memperhatikan kesediaan akses infrastruktur, akses informasi, dan akses industri pengolahan. Hal ini terkait dengan pembuatan fasilitas penunjang untuk meningkatkan nilai tambah sektor tersebut. Pembuatan *grand design* dirancang berdasarkan skema agropolitan sebagai berikut.

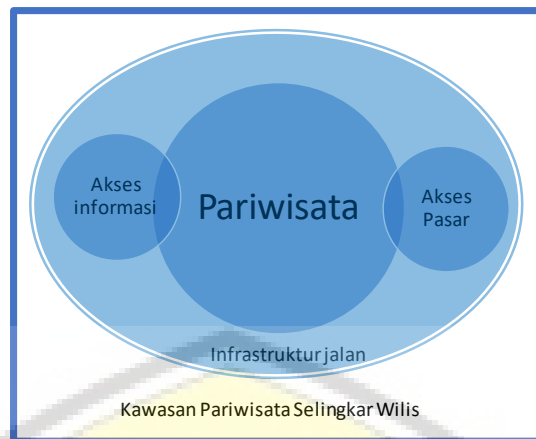


Gambar 5.1 *Grand design* pengembangan wilayah Selingkar Wilis sektor agropolitan

Berdasarkan skema tersebut dirancang pengembangan komoditas mengacu pada keunggulan masing-masing yang dimiliki kecamatan. Selain itu perlu adanya fasilitas pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. Fasilitas pengolahan sudah banyak berada di masing-masing kecamatan namun perlu fasilitasi koordinasi masing-masing wilayah untuk meningkatkan kinerjanya misalnya kemudahan akses untuk mendapatkan bahan baku, kemudahan akses pasar dan lainnya.

Sektor pangan unggul di semua kecamatan (termasuk jenis pangannya), maka fasilitasi industri pengolahan dapat bertempat di salah satu dari kecamatan tersebut. Komoditas sayuran unggul di semua kecamatan, fasilitas pasar diarahkan pada salah satu dari kecamatan tersebut. Selanjutnya sektor buah banyak unggul di masing-masing Kecamatan Bendungan, Gemarang, Kare, dan Mojo. Karenanya, design pengembangan sektor buah di arahkan pada fasilitasi sektor pengolahan, dan akses pasar di salah satu kecamatan tersebut. Sektor peternakan unggul di Kecamatan Sendang, Pagerwojo, Bendungan, Gemarang, dan Banyakan, karenanya fasilitasi industri pengolahan dan akses pasar diarahkan pada salah satu kecamatan tersebut. Terakhir, sektor perkebunan unggul di Kecamatan Pagerwojo dan Grogol, karenanya fasilitasi industry pengolahan diarahkan pada kecamatan-kecamatan tersebut. Desain ini lebih dikenal dengan istilah agropolitan. Tentunya untuk mendukung sektor agropolitan (pertanian, pengolahan, akses pasar) penyediaan sarana infrastruktur jalan menjadi satu hal yang utama.

Selain sektor pertanian, penataan sektor pariwisata juga perlu dilakukan. Hal ini karena potensi sektor ini yang besar. Penataan sektor pariwisata diarahkan pada pembentukan kawasan yang memiliki akses informasi dan akses pasar sektor pariwisata seperti desain berikut.



5.3 Identifikasi Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis

Sejak ditandatangani nota kesepahaman antar masing-masing Kabupaten tahun 2014 kerjasama antar kabupaten di daerah Selingkar Wilis terus mengalami peningkatan. Untuk memaduserasikan program-program pembangunan antar kabupaten keenam kabupaten membentuk sekretariat bersama. Sekretariat bersama tersebut bertugas mengkomunikasikan perkembangan kerjasama, mendiskusikan, dan mencari solusi tentang permasalahan yang ada. Sekretariat bersama tersebut mengalami perpindahan berdasarkan kesepakatan bersama setiap dua tahun. Pada dua tahun pertama (2014-2016) sekretariat bersama bertempat di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya pada dua tahun kedua (2016-2018) sekretariat berada di Kabupaten Trenggalek, dan seterusnya masing-masing adalah Kabupaten Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kediri.

Infrastruktur jalan merupakan hal penting dalam pengembangan wilayah. Infrastruktur jalan yang menghubungkan masing-masing kecamatan antar kabupaten tersebut berstatus jalan nasional. Artinya, pemerintah pusatlah yang memiliki wewenang untuk mengelola (termasuk memperbaikinya).

Kondisi infrastruktur jalan di Kawasan tersebut sangat bervariasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Sebagian jalan masih dalam kondisi bebatuan (belum beraspal) dan sempit dengan luas empat meter. Berdasarkan

wawancara hanya 30% jalan yang kondisinya bagus, selebihnya berupa jalan pengerasan.

Karena pentingnya kawasan Selingkar Wilis tersebut, tahun 2015 pemerintah (pusat) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN 5) yang berkantor di Kabupaten Sidoarjo sedang melakukan studi kelayakan pembangunan jalan tersebut. Rencana pembangunan jalan tersebut sepanjang 235 km² dengan lebar jalan 9 m. Studi ini mengkaitkan potensi ekonomi yang dapat digerakkan dengan pembangunan jalan selingkar wilis.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pihak terkait diketahui bahwa masing-masing kabupaten telah berupaya untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, termasuk daerah-daerah yang ada di kawasan Selingkar Wilis. Kabupaten Tulungagung, misalnya telah mengidentifikasi daerah-daerah yang akan dikembangkan. Begitu juga Kabupaten Trenggalek, Madiun, dan Kediri. Bahkan khusus di Kediri telah berupaya melakukan studi kelayakan pengembangan jalan tembus Kabupaten Kediri ke Kabupaten Trenggalek dengan memecah (menembus) selingkar Wilis. Namun demikian, karena keterbatasan anggaran, mereka belum memberikan porsi (persentase) lebih besar untuk mengembangkan daerah selingkar Wilis tersebut.

5.4 Hambatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur

Implementasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Grand Design Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis di Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa hambatan sesuai dengan kajian yang dilakukan di Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Adapun hambatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Pertama, kerjasama pelayanan publik; dalam hal ini masing-masing kabupaten masih melaksanakan pelayanan publik internal kabupaten itu sendiri, belum adanya pembahasan pelayanan publik secara bersama. Misalkan belum adanya payung hukum yang dibuat semisal perda yang akan mengatur

bagaimana antar kabupaten melakukan kerjasama pengelolaan investasi yang membutuhkan perijinan dan administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh kabupaten yang bersangkutan. Hambatan pelayanan publik terkait keadministrasian ini seringkali menjadi hambatan awal dan utama bagi implementasi kerjasama, maka dari itu masing-masing kabupaten harus duduk bersama untuk membahas mekanisme kerjasama yang membutuhkan persyaratan administrasi bersama. Misalkan bagaimana mengatur kerjasama antar SKPD di kabupaten yang bersangkutan, antara pemerintah kabupaten dengan pihak swasta di kabupaten lain.

Kedua, kerjasama kawasan perbatasan; kawasan perbatasan seringkali menjadi sumber konflik antar daerah. Di kabupaten lokus penelitian ini masih memiliki hambatan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Adapun hambatan yang sering muncul adalah kurangnya **pembangunan infrastruktur** seperti **jalan** dan **jembatan** penghubung antar daerah. Apabila suatu wilayah perbatasan memiliki infrastruktur lengkap dan digunakan secara bersama maka akan dapat mempermudah aliran sumberdaya yang diperlukan dari kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Pada kondisi eksisting memang sudah ada sarana prasarana jalan dan jembatan, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya masih belum bagus. Bahkan di Kabupaten Madiun kondisi jalan penghubung antar kabupaten masih **60 %** yang dapat dikatakan layak menurut analisis kelayakan yang dilakukan DPU Bina Marga dan Cipta Karya. Jembatan penghubung juga masih dalam tataran perencanaan untuk dibangun di 2 (dua) kecamatan penghubung.

Ketiga, kerjasama Tata Ruang; perencanaan tata ruang dan wilayah dari masing-masing kabupaten di selingkar Gunung Wilis masih **belum** saling terkait satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan tiap-tiap kabupaten memiliki prioritas pembangunan yang berbeda. Maka dari itu ketidakpaduan program pembangunan selingkar Gunung Wilis oleh kabupaten yang bersangkutan dapat menghambat percepatan pembangunan di kawasan tersebut. Terkait juga dengan penganggaran pembangunan di tiap kabupaten, dimana jika setiap kabupaten memasukkan **program prioritas pembangunan** di kawasan Selingkar

Gunung Wilis maka akan dapat menganggarkan dalam RAPBD dan APBD. Dikarenakan tidak dimasukkannya program prioritas pembangunan di kawasan Selingkar Gunung Wilis maka pos **anggaran** untuk pembangunan di kawasan tersebut menjadi minim bahkan kurang.

Keempat, kerjasama kebencanaan; **masih belum** ada tindak lanjut baik melalui program maupun aksi kegiatan yang terfokus di kawasan Selingkar Gunung Wilis. Secara umum sudah dilakukan upaya mengenai perencanaan penanggulangan bersama. Salah satunya melalui pelatihan Tagana di setiap kabupaten yang bersangkutan.

Kelima, kerjasama pengurangan kemiskinan; masih hanya terkait pengurangan kemiskinan secara umum. Untuk program spesifik di kawasan Selingkar Gunung Wilis masih belum terpadu. Ada yang dikaitkan dengan program pariwisata melalui program desa wisata, agropolitan, dan kegiatan sejenis yang di masing-masing kabupaten berbeda menurut potensi yang dimiliki.

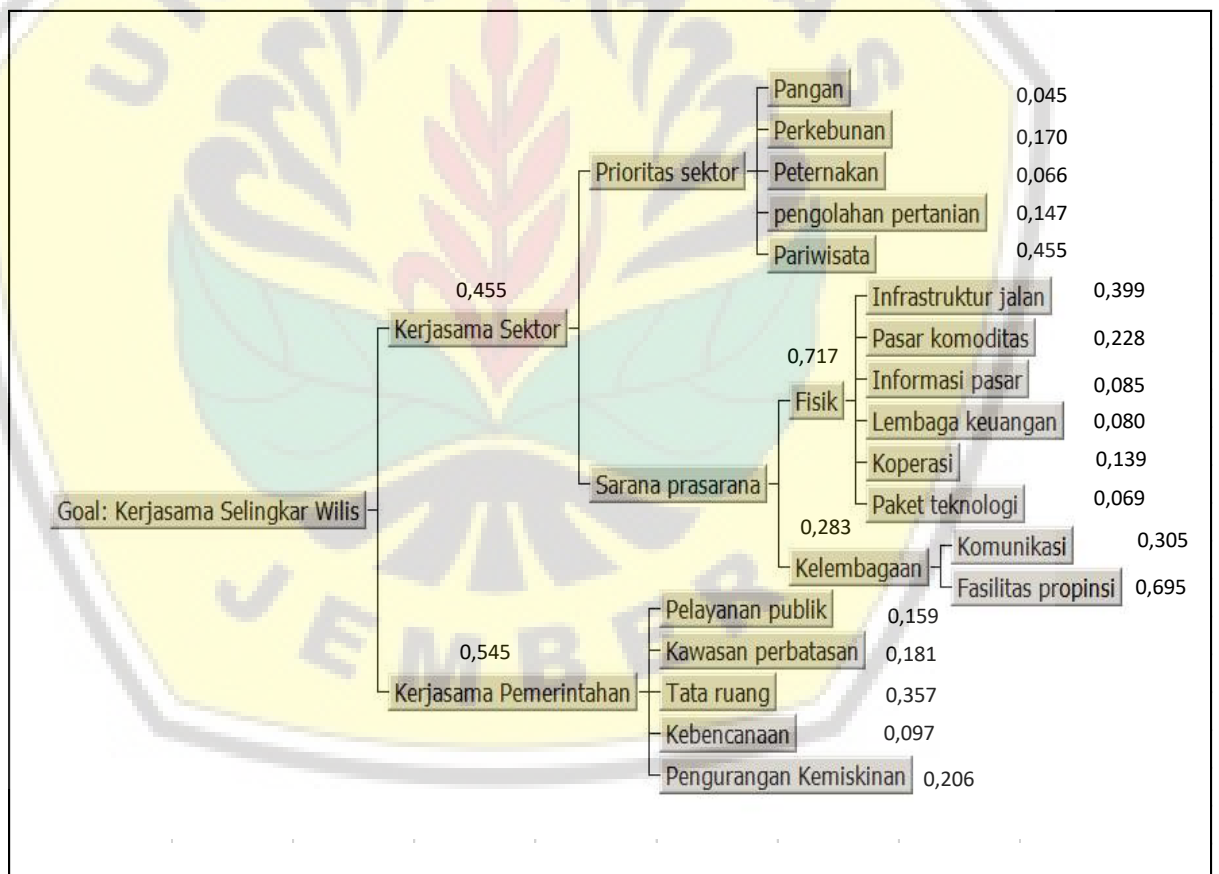
Keenam, kerjasama dengan pihak lain; bahwa sebagian wilayah pengembangan pembangunan di kawasan Selingkar Gunung Wilis masih ada yang merupakan wilayah swasta dan otoritas Perum Perhutani (Persero). Maka dari itu masih ada beberapa masalah yang ditimbulkan. Hambatan yang ditimbulkan oleh kondisi ini adalah tertutupnya akses potensi kabupaten karena melewati area perkebunan swasta dan otoritas Perum Perhutani (Persero) sehingga pemerintah kabupaten tidak dapat mengakses potensi daerah tersebut. Beberapa daerah sudah melakukan MoU dengan pihak Perhutani seperti Pemerintah Kabupaten Madiun, sehingga perencanaan pembangunan kawasan Selingkar Gunung Wilis dapat di lanjutkan.

5.5 Model Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis

Model kerjasama antar pemerintah daerah dibentuk berdasarkan kerangka teori kerjasama wilayah dan kondisi riil di wilayah penelitian. Kerjasama dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat kerjasama yang paling

tinggi baik manfaat ekonomi maupun lainnya. Terdapat dua cara utama untuk mencapai tujuan yaitu kerjasama sektor dan kerjasama pemerintahan. Kerjasama sektor artinya melakukan berbagai hal yang dapat meningkatkan kinerja sektor perekonomian dalam wilayah Selingkar Wilis, sedangkan kerjasama pemerintahan diartikan sebagai upaya yang dilakukan yang sifatnya administrative (bersifat tidak langsung terhadap sektor). Masing-masing tujuan memiliki prioritas cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah memberikan penilaian masing-masing prioritas yang telah ditetapkan. Penilaian diberikan oleh ahli (yang terlibat dalam pengambilan keputusan) tentang kerjasama Selingkar Wilis. Selengkapnya hasil analisis dapat dilihat dalam tabel berikut.



Gambar 5.2 Hasil analisis proses pengambilan keputusan berjenjang kerjasama selingkar Wilis

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa yang menjadi prioritas kerjasama Selingkar Wilis adalah kerjasama pemerintahan, dengan prioritas 54.5% atau kurang lebih 10% lebih tinggi dibandingkan dengan kerjasama sektor. Dalam tataran praktis kerjasama sama antar pemerintahan secara informal sudah dimulai sejak tahun 2011 yang telah melakukan diskusi-diskusi informal pembentukan kawasan Selingkar Wilis yang akhirnya secara legal formal dikerjasamakan pada tahun 2014. Meskipun demikian kerjasama sektor merupakan kerjasama yang penting mengingat pengembangan sektor merupakan ujung dari kerjasama ini. Kerjasama kelembagaan diprioritaskan pada penataan ruang di kawasan selingkar wilis dengan persentase sebesar 35,7%. Artinya pemetaan kawasan menjadi prioritas kelembagaan antar Kabupaten. Dalam tataran praktis Sekertariat bersama perlu membuat pemetaan Kawasan Selingkar Wilis berdasarkan potensi masing-masing kecamatan. Selain itu diperlukan rencana strategis (baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang) dalam pengembangan wilayah. Selain itu, prioritas yang menjadi pilihan adalah pengentaskan kemiskinan dan pelayanan publik.

Pada pilihan sektor, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling diprioritaskan untuk dikembangkan dengan persentase sebesar 45,5%. Hal ini berdasarkan potensi wisata alam yang dimiliki Wilayah Selingkar Wilis yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Selingkar Wilis mulai Kecamatan Sendang di Kabupaten Tulungagung hingga Kecamatan Mojo di Kabupaten Kediri yang paling tidak berjumlah dua puluh lokasi. Hal ini sangat terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana terutama prasarana jalan. Sektor lain yang menjadi prioritas adalah sektor perkebunan, sektor peternakan, dan sektor pangan. Ketiga sektor ini sangat ditunjang oleh sektor pengolahan yang sangat penting dalam peningkatan nilai tambah sektor dasar.

Selain pilihan sektor hal penting lain adalah pengembangan sarana dan prasarana yang h terbagi baik sarana fisik dan kelembagaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sarana fisik lebih diutamakan dibandingkan sarana kelembagaan dengan prosentase 71,7% dibandingkan dengan 28.3%.

Selanjutnya, yang paling diprioritaskan dalam prasarana fisik adalah infrastruktur jalan utama dengan persentase sebesar 39,9%. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa infrastruktur jalan adalah penghubung utama sebuah perekonomian. Jalan sangat membantu dalam peredaran barang dari satu kecamatan ke kecamatan lain. Sarana dan prasarana lain yang menjadi prioritas adalah adanya pasar komoditas. Pasar tradisional sudah banyak dimiliki oleh masing-masing kecamatan di selingkar wilis. Namun perlu kajian lebih komprehensif apakah pasar-pasar yang ada telah mampu untuk meningkatkan kinerja masing-masing sektor atau belum.

Dari sisi kelembagaan, prioritas yang diutamakan adalah fasilitasi propinsi dengan prosentase sebesar 69,5%. Hal ini karena masing-masing kabupaten memiliki keterbatasan anggaran. Beberapa kabupaten masih belum memasukkan agenda pengembangan Kawasan Selingkar Wilis secara spesifik dengan prioritas lebih dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Karenanya fasilitasi dari propinsi sangat diperlukan terutama akses-akses jalan kabupaten menuju masing-masing obyek wisata potensial.

Berdasarkan pembahasan sub bab 5 ini dapat disimpulkan bahwa model kerjasama Selingkar Wilis memiliki prioritas kerjasama dalam bidang pemerintahan dibandingkan dengan kerjasama sektor, terutama dalam upaya penataan ruang kawasan selingkar Wilis. Namun demikian, prioritas kerjasama pemerintahan sedikit lebih tinggi (10%) dibandingkan dengan kerjasama sektor. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya merupakan hal yang saling menunjang. Kerjasama pemerintahan akan dapat menunjang kerjasama sektor.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data, hasil analisis, dan pembahasan maka beberapa hal penting dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kawasan selingkar wilis memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian dan pariwisata. Paling tidak terdapat 66.280 hektar lahan yang digunakan untuk memproduksi tanaman pangan dengan potensi sebesar 606.892 ton. Paling tidak terdapat 300 hektar lahan yang ditanami dengan sayur-sayuran. Khusus untuk sektor peternakan, jumlah ternak sapi di wilayah selingkar Wilis sebanyak 50.126 ekor untuk sapi potong dan 20.026 untuk sapi perah. Selain itu kawasan ini juga sektor perkebunan kopi dan cengkeh yang tersebar di beberapa kecamatan. Selanjutnya, paling tidak terdapat 20 lokasi wisata yang tersebar di kecamatan-kecamatan Sendang, Pagerwojo, Kare, Dagangan, Semen, dan Wojo.
2. Grand design Kawasan Selingkar Wilis diarahkan pada pembentukan Kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata. Pembentukan kawasan agropolitan didasarkan pada keunggulan sektor masing-masing kecamatan. Pembentukan kawasan agropolitan dilakukan dengan fasilitasi pemetaan industry pengolahan, fasilitasi akses pasar, dan fasilitasi akses informasi yang ada di Kawasan Selingkar Wilis. Pembentukan Kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan fasilitasi akses informasi dan akses pasar.
3. Pemerintah Dearah di Kawasan Selingkar Wilis telah melakukan kerjasama dalam Penyusunan *Grand Design* Penataan Kawasan Selingkar Gunung Wilis dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antar kabupaten yang diketahui oleh Gubernur. MoU ini ditindak lanjuti dengan pembentukan sekertariat (kantor) bersama yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kerjasama, identifikasi masalah yang ada, dan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam

implementasinya, pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V (BBPJN 5) telah melakukan studi kelayakan pembangunan jalan nasional Selingkar Wilis.

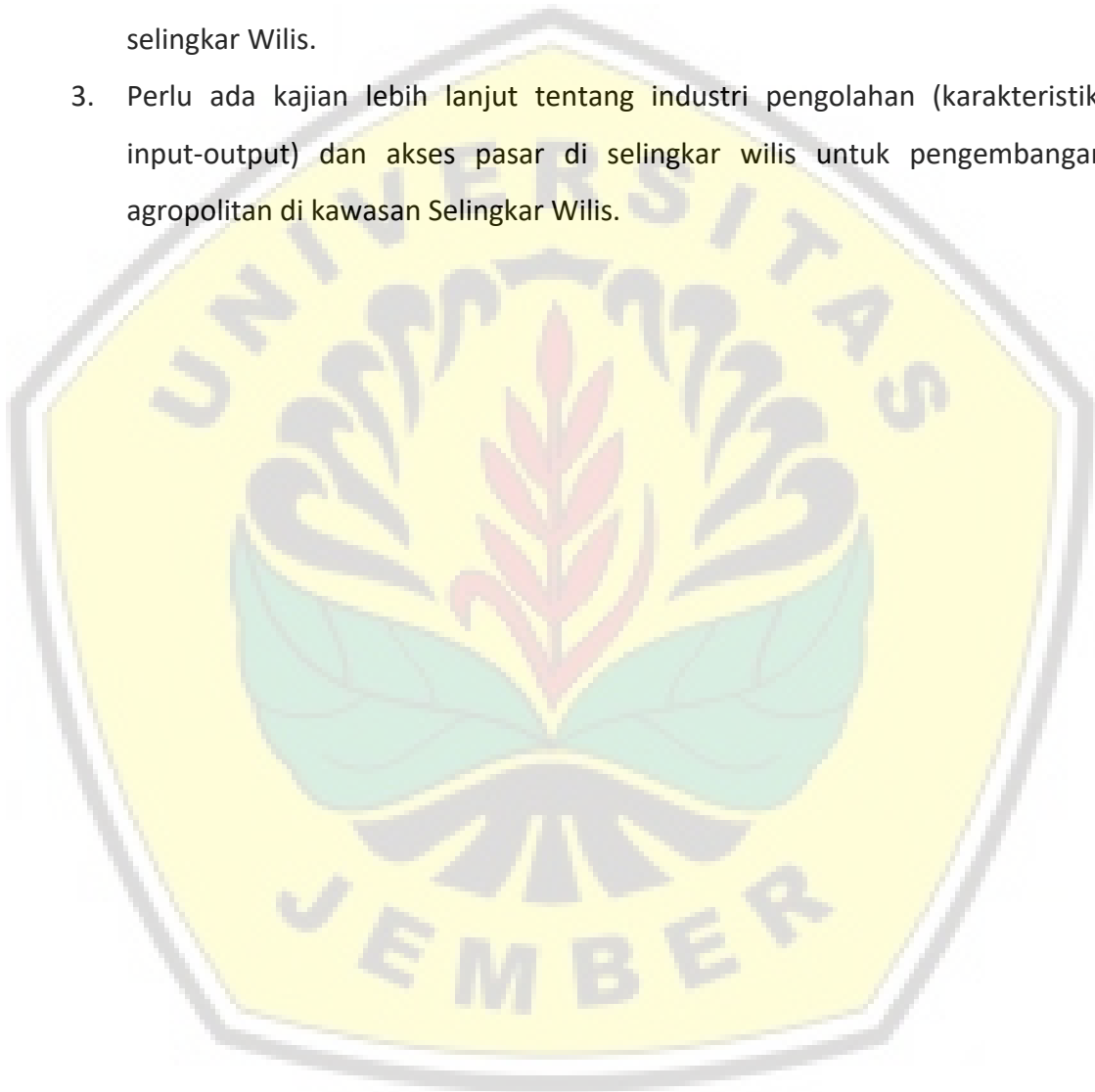
4. Dalam pelaksanaan kerjasama Selingkar Wilis terdapat beberapa hambatan antara lain hambatan ruang dan hambatan anggaran. Terkait pembangunan jalan di Selingkar Wilis, hamatan yang muncul adalah kepemilikan lahan yang akan digunakan jalan bukan milik pemerintah daerah masing-masing Kabupaten, akan tetapi kepemilikan Perhutani dan sebagian kepemilikan Swasta. Selain itu, pemerintah Daerah juga memiliki keterbatasan anggaran untuk lebih memprioritaskan pengembangan daerah-daerah di Selingkar Wilis. Untuk mengatasi hambatan ini, contoh Kasus di Kecamatan Madiun telah melakukan MoU dengan Perhutani untuk membahas kelancaran pembangunan jalan tersebut.
5. Model kerjasama Selingkar Wilis memiliki prioritas kerjasama dalam bidang pemerintahan dibandingkan dengan kerjasama sektor, terutama dalam upaya penataan ruang kawasan selingkar Wilis. Namun demikian, kerjasama sektor juga perlu diperhatikan, karena ujung tombak kerjasama adalah peningkatan perkonomian rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa keduanya (kerjasama pemerintahan dan sektor) merupakan hal yang saling menunjang. Artinya fasilitasi pemerintahan akan dapat menunjang peningkatan sektor.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Permasalahan utama dalam penataan ruang (pembangunan jalan di kawasan) adalah kepemilikan lahan. Terkait dengan hal ini, Kabupaten Madiun telah melakukan MoU dengan pihak Perhutani untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Oleh karenanya, disarankan bagi pemerintah daerah di kabupaten lain untuk belajar dari kabupan Madiun (*lesson learned*).

2. Permasalahan lain terkait pengembangan wilayah di masing-masing kabupaten adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kabupaten, sehingga kabupaten tidak bisa memberikan prioritas khusus untuk pengembangan wilayah tersebut. Disarankan perlu adanya fasilitasi pihak propinsi untuk mengembangkan kawasan Selingkar Wilis dengan Identifikasi upaya percepatan pembentukan kawasan agropolitan dan kawasan pariwisata di selingkar Wilis.
3. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang industri pengolahan (karakteristik, input-output) dan akses pasar di selingkar wilis untuk pengembangan agropolitan di kawasan Selingkar Wilis.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2004, Ringkasan Eksekutif Penelitian tentang Permasalahan Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Surabaya: Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2015. Kabupaten Madiun dalam Angka Tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015. Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2015. Kabupaten Tulungagung dalam Angka Tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2015. Kabupaten Trenggalek dalam Angka Tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2015, *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2015*, Tulungagung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2015, *Kecamatan Sendang dalam Angka 2015*, Tulungagung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2015, *Kecamatan Pagerwojo dalam Angka 2015*, Tulungagung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2015, *Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2015*, Trenggalek

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2015, *Kecamatan Bendungan dalam Angka 2015*, Trenggalek

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2015, *Kabupaten Ponorogo dalam Angka 2015*, Ponorogo

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, 2015, *Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2015*, Nganjuk

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2015, *Kabupaten Madiun dalam Angka 2015*, Madiun

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2015, *Kecamatan Kare dalam Angka 2015*, Madiun

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2015, *Kecamatan Gemarang dalam Angka 2015*, Madiun

Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, 2015, *Kecamatan Dagangan dalam Angka 2015*, Madiun

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015, *Kabupaten Kediri dalam Angka 2015*, Kediri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015, *Kecamatan Semen dalam Angka 2015*, Kediri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015, *Kecamatan Mojo dalam Angka 2015*, Kediri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015, *Kecamatan Banyakan dalam Angka 2015*, Kediri

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2015, *Kecamatan Grogol dalam Angka 2015*, Kediri

Dawud, Joni, et. al., 2003, Hubungan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, Bandung: PKDA I LAN.

Budiharsono S., (2001)., Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, Pradnya Paramita. Jakarta.

Budiharsono. 2002. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta: Pradnya Paramita.

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2007. Panduan Penyusunan Rencana Program Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Keban, Yeremias T., 2009, Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip, http://www.bappenas.go.id/no_de/48/2258/kerjasama-antar-pemerintah-daerah-dalam-era-otonomi oleh yeremias t keban, diunduh 27 Januari 2016

Rustiadi, Ernan, 2006, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, edisi Mei 2006, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.

Rustiadi, Ernan; Saefulhakim, Sunsun dan Dyah R. Panuju, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Pres dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Saaty, T. Lorie. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Pustaka Binama Pressindo.

Saefulhakim, dkk. 2002. *Studi Penyusunan Wilayah Pengembangan Strategis (Strategic Development Regions)*. IPB dan Bapenas. Bogor.

Siagian, S.P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal.69

Tarigan, Robinson, 2010. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Bumi Aksara, Jakarta.

Tarigan, Antonius, *Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah dalam* http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&i_dart=161, diunduh 27 Januari 2016.

Triutomo, Sugeng. 2001. *Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Terpadu dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*, Jakarta: BPPT.